

**EKSPLORASI PERAN AUDIT SYARIAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK
SHARIA COMPLIANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi kasus pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana

Akuntansi (S.Ak) Prodi Akuntansi

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SAFARINA PURNAMASARI

NIM: 90800113181

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safarina Purnamasari

NIM : 10800113181

Tempat/Tgl. Lahir : Bima, 06 Februari 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/ Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Samata

Judul : Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik
Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi
kasus pada BPR Syarah Niaga Madani Makassar).

Menyatakan dengan penuh kesungguhan dan kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 15 Agustus 2020

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Safarina Purnamasari

10800113181



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax: 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Lompot Romangpolong – Gowa ■ 424835, Fax: 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus BPRS Niaga Madani Makassar) yang disusun oleh Safarina Purnamasari, NIM. 10800113181, Mahasiswi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 27 Februari 2020 M, bertepatan dengan 3 Rajab 1441 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, 14 September 2020 M

26 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.	(.....)
Munaqisy I	: Jamaluddin M, SE., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Alim Syariati, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Suhartono, SE., M.Si., Akt.	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

NIM 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu,alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallaahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju alam yang Islamiyyah.

Penulisan skripsi dengan judul **“Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar)”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan penghargaan kepada semua pihak yang telah memotivasi. Teristimewa kepada almarhum ayahanda tercinta Zakaria A. Rahim (Alm) yang menemani perjalanan penulis sampai semester IV (semoga bahagia disisi Allah) dan ibundaku tercinta Asma yang sampai saat ini masih mengerahkan segala usaha, do'a, harapan serta pengorbanan, baik dari segi moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Dan ucapan terimakasih pula kepada saudara-saudaraku yang

senantiasa memberikan hiburan, semangat terutama kakak nomor duaku yang ikut serta memberikan bantuan materi pada penulis.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof.Dr.H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Memen Suwandi M. SE.,M.Si. dan ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E.,M.Si., Ak selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Suhartono, SE., M.Si, Akt selaku pembimbing II, atas kesediaannya memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan-masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Jamaluddin M, SE., M.Si., selaku dosen penguji I dan bapak Dr. Alim Syahriati, M.Si. sebagai penguji II yang telah memberikan arahan yang membangun serta masukan yang sangat membantu dan berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si, Ak selaku Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Teman-temanku jurusan akuntansi 2013 yang tak dapat kusebutkan satu persatu, dan teristimewa kepada teman-teman akuntansi D, terima kasih atas dukungannya dan semangat yang telah kalian berikan selama ini.
9. Seluruh Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar, kakak-kakak maupun adik-adik tercinta, terimakasih atas persaudaraannya.
10. Teruntuk sobat-sobat legend akuntansi ku Afni, Sany, Naura, Indah, Rizka, dan masih banyak lagi, terimakasih sudah selalu setia menemani selama hampir 7 tahun ini. Karena kalian, aku gak sendirian nungguin dosen di kampus dan Terimakasih juga untuk skandalnya selama ini gess wkwkw semoga kita sukses semua aamiin.
11. Ketiga saudara kandungku, Fauzi, Wati, dan Rahma, terimakasih selalu memberikan motivasi untuk tidak menyerah ditengah jalan serta setia mengirimkan do'a dari jauh untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman KKN angkatan 58, teristimewa teman-teman satu poskoku Nunu, Fitri, Ulfa, Ipul, Hasbi, dan Hendra di Desa Toddopuli, kec. Bua, kabupaten Luwu Sulawesi Selatan yang telah menjadi keluarga selama masa mengabdi.

13. Bapak dan Ibu Posko KKN tercinta yang sudah menganggap kami sebagai anaknya sendiri, terimakasih sudah bersedia menampung dan menopang kami selama masa mengabdikan.

14. Seluruh pegawai dan staff BPR Syariah Niaga Madani Makassar yang telah memberikan partisipasi dan informasi mengenai judul yang diteliti oleh penulis.

15. Dan kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, saran, dukungan yang tiada hentinya.

Akhirnya, harapan penulis, semoga bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan, serta generasi selanjutnya yang akan menyelesaikan tugas akhir.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Samata, Februari 2020

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Safarina Purnamasari
10800113181

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Syariah Enterprise Theory (SET)	13
B. Tauhid	16
C. Akad (Perjanjian)	21
D. Audit Syariah	22
E. Sharia Compliance (kepatuhan Syariah)	23
F. Pengawasan Kepatuhan Syariah	24
G. Lembaga Keuangan Syariah	28
H. Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Instrument Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	33
1. Wawancara Mendalam	34
2. Studi Pustaka	34
3. Studi Dokumentasi	35
4. Internet Searching	35
F. Metode Analisis Data	35
G. Uji Keabsahan Data	36
1. Uji Validitas Internal	36
2. Uji Reliabilitas	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Perusahaan	39
1. Sejarah BPRS Niaga Madani	39
2. Visi dan Misi BPRS Niaga Madani	41
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	43
1. Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Sharia Compliance.....	43
2. Kerangka Kerja Audit Syariah dalam Pengawasan Sharia Compliance	56
a. Fatwa DSN MUI	57
b. PSAK Syariah	62

3. Konsep Tauhid pada Pengimplementasian Audit Kepatuhan Syariah	63
a. Tauhid Rububiyah	68
b. Tauhid Uluhiyah	69
c. Tauhid Asma Wa Sifat	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
C. Keterbatasan Penelitian	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Nama : Safarina Purnamasari

Nim : 90800113181

Judul :Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus BPR Syariah Niaga Madani Makassar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Audit Syariah dalam Pengawasan *Sharia Compliance* pada BPRS Niaga Madani Makassar dengan berfokus pada 3 pokok pembahasan, yaitu peran *sharia compliance* audit, *framework* audit syariah, serta konsep tauhid yang terkandung pada implementasi *sharia compliance* audit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun informan dari pihak BPRS Niaga Madani Makassar ini terdiri dari dua informan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Human Resource Departement (HRD). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari data internal perusahaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Peran *sharia compliance audit* pada BPRS Niaga Madani Makassar adalah pengawasan terhadap laporan keuangan, produk-produk, layanan, serta SDM dalam hal ini para karyawan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan *framework* audit syariah pada BPRS Niaga Madani berpedoman pada fatwa DSN MUI untuk pemeriksaan di luar dari aspek keuangan dan PSAK Syariah sebagai pedoman dalam mengaudit laporan keuangan. Dan pengimplementasian konsep tauhid terhadap *sharia compliance audit* pada BPRS Niaga Madani Makassar adalah menerapkan sikap jujur serta amanah dalam pelaksanaan auditnya.

Kata Kunci: Audit Syariah, *Sharia Compliance*, *Framework*, dan Konsep Tauhid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan terbaru memperlihatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkompetisi untuk mengeluarkan produk dan layanan kepada nasabah. Namun, bisa jadi LKS mengabaikan aspek syariah tertentu yang akhirnya mempengaruhi sifat kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang menjadi elemen utama yang harus dipelihara. Hal demikian terjadi karena bank-bank dengan label syariah tidak selalu diikuti dengan pengelolaan usaha yang benar-benar sesuai prinsip syariah, tetapi sebagian didirikan hanya demi kepentingan bisnis semata (Thayibatun, 2009).

Pada kasus yang terjadi pada bank syariah mandiri cabang Bogor yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM (Kompas.com/read/2013/10/24).

Tidak hanya di Indonesia, beberapa kasus pada bank syariah juga pernah terjadi di negara lain, seperti yang terjadi pada *Dubai Islamic Bank* yang kehilangan sekitar US\$ 300 miliar akibat laporan keuangan yang tidak tepat dan pada *Islamic Bank Of South Africa* yang bangkrut pada tahun 1997 dengan hutang antara R50 hingga R70 juta yang disebabkan oleh manajemen yang buruk serta sistem akuntansi dan manajemen yang tidak tepat (Rini, 2014). Dari adanya kasus-kasus tersebut, membuktikan tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah terutama bank

yang berbasis syariah bebas dari tindakan *fraud*. *Fraud* (kecurangan) dalam organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan, mulai dari level bawah, pihak manajemen, sampai pemilik (Anugerah, 2014). Oleh karena itu, sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia Compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud* (Sula, 2014).

Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, dimana tantangan terbesar adalah mempertahankan citra dan nama baik dimata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatusun, 2012). Sebagaimana yang diketahui, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist dan ijmak para ulama yang diterapkan baik di lingkungan dalam maupun luar perusahaan (Maradita, 2014).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki karakteristik yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). LKS diharuskan untuk mematuhi segala ketentuan syariah (*sharia compliance*) dalam menjalankan kegiatan usaha dan produknya. Perbedaan karakteristik ini mempengaruhi bentuk dan standard pengawasan dan audit terhadap LKS. Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi Audit Internal audit baru, yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan

akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah, sehingga *stakeholder* merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam (Mardiyah dan Mardian, 2015).

Ruang Lingkup Audit Syariah dan Peran Auditor Syariah tentu berbeda dengan audit konvensional. Audit syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena auditor diharapkan dapat berurusan dengan peraturan dan pedoman yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan tugas auditor syariah yang juga harus melakukan uji kepatuhan syariah. Mereka harus memastikan bahwa manajemen telah mengikuti prinsip bebas *riba* dan halal yang telah ditentukan oleh DPS (Haniffa, 2010). Menyinggung masalah syariah dalam suatu instansi, seorang auditor sebaiknya menganut sifat-sifat Rasulullah yakni tauhid, dimana tauhid bermakna komitmen seseorang kepada Allah sebagai pusat orientasi dan fokus dari seluruh rasa hormat, tunduk, patuh, syukur, dan sebagai satu-satunya sumber nilai, apa yang dikehendaki Allah akan menjadi nilai bagi manusia tauhid, dan ia tidak akan mau menerima otoritas ataupun petunjuk kecuali otoritas dan petunjuk Allah. Komitmennya kepada Allah utuh, total, positif, kukuh, mencakup cinta dan pengabdian, ketaatan dan kepasrahan, serta kemauan untuk menjalankan kehendak-kehendaknya (Hasbi, 2009). Fokus auditor syariah bukan hanya pada aspek keuangan, lebih daripada itu, auditor syariah harus bisa memastikan produk, jasa, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh LKS telah sesuai dengan prinsip syariah (Yaacob, 2012).

Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan uji kompetensi bagi auditor syariah ini difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagai organisasi profesi akuntan, IAI menyediakan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) bagi auditor syariah, namun sertifikasi yang diberikan ini dirasa masih belum optimal karena materi dalam SAS belum mencakup konsep dasar dan proses audit syariah sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau pelatihan auditor syariah di beberapa negara yang telah memiliki auditor syariah. Hal inilah yang mendasari perlunya kajian lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi auditor syariah di Indonesia (sari kusuma dewi, 2019).

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perlu memiliki model tata kelola yang handal dan strategi yang tepat untuk mendorong pelaksanaan *shariah compliance* yang kuat dan efektif. Pemenuhan kepatuhan syariah tersebut bertujuan menjaga citra publik khususnya kepentingan *stakeholder* dengan harapan mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatan investasi yang bebas dari riba. Suatu rangkaian proses pemenuhan kebutuhan *shariah compliance* tersebut adalah pelaksanaan audit syariah (Riani dan Mardian, 2017).

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran Qur'an surah Al-hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا

فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ ﴿٦﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Ayat ini menunjukkan begitu pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah ataupun bencana. Begitupun dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, karena keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak melanggar aturan atau pengujian kepatuhan syariah.

Seorang auditor harus memiliki sifat independen yaitu tidak adanya pengaruh dan ketergantungan terhadap apapun. Namun yang menjadi catatan penting dalam audit syariah ini adalah masalah kompetensi dan independensinya. Kompetensi auditor dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan simposium (Suraida, 2005). Dengan kata lain, kompetensi

adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir serta bertindak sesuai dengan profesinya. Karena tentunya seorang auditor syariah memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia, maka dari itu sebagai hambanya tentu akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dikemudian hari, baik itu perbuatan kecil maupun besar. Sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Terjemahan:

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya, 8. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.

Oleh karena itu, seorang auditor syariah memiliki tanggung jawab yang besar. Karena selain harus bertanggung jawab kepada pihak manajemen perusahaan, atasan, *public*, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat, seorang auditor syariah juga bertanggung jawab kepada Allah SWT. Khan (1985) dan Uddin, Ullah, & Mossain (2013) mengungkapkan bahwa auditor syariah berperan sebagai pihak yang memberikan jaminan pada investor yang menyediakan dana dengan akad *mudharabah* berdasarkan prinsip bagi hasil bahwa laba atau (rugi) yang dinyatakan oleh manajemen adalah benar. Para pemegang kepentingan terutama investor,

memerlukan jaminan bahwa LKS yang mereka danai telah mengelola dana yang mereka berikan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Tanpa adanya jaminan dari auditor, maka investor akan merasa enggan untuk mendanai LKS karena praktik keuangan bebas bunga/*riba* akan menjadi tidak mungkin untuk diwujudkan.

Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan termasuk bisnis dan transaksi keuangan (Antonio, 2010). Konsep keuangan berbasis syariah Islam ini telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (*shariah compliance*), maupun bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan (*profit source*). Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam saat ini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam global juga telah didirikan, seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution* (AAOIFI), *International Financial Service Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM), dan *Islamic Research and Training Institute* (IRTI).

Kemunculan ilmu ekonomi islam modern di panggung internasional, dimulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid

Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dll. Sejalan dengan ini mulai terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut bank antar pemerintah yang bertujuan menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya.

Perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia sendiri dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam UU nomor 10 tahun 1998. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 lahirlah perbankan syariah yang kedua yaitu Bank Syariah Mandiri. Dan sampai saat ini telah berdiri unit usaha syariah sebanyak 21 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 168 unit. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia.

Perkembangan perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia dan dibanyak Negara pada saat ini terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara umum, kedua jenis bank maupun LKBB ini seolah-olah sama. Kesamaan diantara keduanya, terutama dimata orang awam, adalah sama-sama mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari dan kepada masyarakat. Kadang masyarakat, terutama masyarakat awam, sulit membedakan praktik perbankan konvensional maupun syariah di lapangan, khususnya di tataran mikro (Hadi, 2017). Akan tetapi dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang

berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis* dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (Umam, 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran audit syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) pada BPRS Niaga Madani Makassar ?
2. Bagaimana kerangka kerja audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* pada BPRS Niaga Madani Makassar?
3. Bagaimana konsep tauhid yang terkandung dalam pengawasan *sharia compliance* pada BPRS Niaga Madani Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran audit syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini BPRS Niaga Madani Makassar.

2. Untuk mengetahui kerangka kerja audit syariah dalam mengawasi *sharia compliance* pada BPRS Niaga Madani Makassar.
3. Untuk mengetahui konsep tauhid yang di terapkan pada BPRS Niaga Madani Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai konsep audit syariah dan bermanfaat dalam pengembangan penelitian mengenai audit syariah berikutnya, serta dapat menegaskan bahwa kinerja keuangan bank syariah tidak hanya sekedar setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perbankan pada saat periode tertentu, melainkan mampu menyajikan sistem kepatuhan syariah yang dapat dijadikan tuntunan hidup dalam berekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah terutama yang berkaitan dengan kinerja audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat juga bagi manajemen dalam mengelola Bank Umum Syariah dengan baik sekaligus juga melaksanakan pertanggungjawaban sosial dengan baik.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan informasi mengenai ekonomi Islam bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Ahmad Baehaqi dan Suyanto (2018)	Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah	Kualitatif	Pengembangan audit syariah oleh audit internal LKS masih belum berjalan ideal. Audit internal LKS belum didukung oleh kompetensi syariah yang memadai dan panduan pemeriksaan berkaitan dengan aspek syariah. Selain itu, dukungan peraturan juga belum mampu menunjukkan dengan jelas peran audit internal dalam membantu tugas DPS melakukan proses pemeriksaan aspek pemenuhan syariah.
Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015)	Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Mengacu pada hasil pembahasan diketahui bahwa mayoritas responden menganggap bahwa praktik audit pada LKS telah berjalan dengan cukup sesuai.
Farida dan Veni Soraya Dewi (2018)	Kompetensi Auditor dan <i>Shariah Compliance</i> terhadap praktik audit syariah.	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menu jukan bahwa hasil uji F, menunjukkan model penelitian adalah fit. Artinya model yang digunakan dalam penelitian ini layak. Penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap praktik audit syariah dan variabel <i>sharia compliance</i> berpengaruh terhadap praktik audit syariah.

Ro'fah Setyowati (2017)	Rasionalitas Pendekatan <i>Shariah Compliance</i> Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan <i>shariah compliance</i> merupakan pilihan tepat, mengingat beberapa rasionalitas, yaitu: filosofis, historis, teoritis-konseptual, empiris-praktis. Dalam upaya peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan <i>Shariah Compliance</i> , sangat membutuhkan peran MUI dan pemerintah secara optimal.
Khotibul Iman (2015)	Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting untuk direalisasikan dalam mencetak Dewan Pengawas Syariah yang handal dan Profesional sehingga dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Shariah Enterprise Theory (SET)*

Enterprise theory oleh beberapa penulis dianggap sebagai teori yang paling pas untuk Akuntansi Syariah karena *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono (2006), yaitu: *humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikal*. Namun demikian, *enterprise theory* masih dibayangi oleh *agency theory* dan politisasi akuntansi. *Enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid (Slamet, 2001). Agar konsep ini benar-benar sesuai dengan syariah, maka perlu diinternalisasikan dengan nilai tauhid. Karena dengan konsep dan nilai tauhid kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.

Perusahaan merupakan sebuah entitas bisnis yang didalamnya melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuannya. Untuk itu akuntabilitas perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam perusahaan sangat dibutuhkan. *Shariah enterprise theory* merupakan konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan *stakeholders* pada perusahaan syariah (Triyuwono, 2015). *Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna

menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Menurut Triyuwono (2003), akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.

Konsep *shariah enterprise theory* akan memberikan landasan yang penting dalam merumuskan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perspektif syariah. Menurut Triyuwono (2006) pertanggungjawaban ada tiga, yaitu yang pertama Allah sebagai sumber utama amanah dan manusia sebagai pengembang amanah. Kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Ketiga, mengenai harta setiap muslim terdapat hak orang lain seperti fakir miskin, anak-anak yatim, *ibnu sabil* dan lain-lain yang dimanifestasikan dalam bentuk zakat, infak dan shodaqah. Begitupun dalam *shariah enterprise theory* baik untuk diimplementasikan dalam *Audit Syariah* pada perbankan syariah.

Shariah enterprise theory menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa *aksioma* terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di muka bumi ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi

amanah. Alam memberikan kontribusi yang besar bagi keberlangsungan perusahaan. Karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang terbesar di alam dan semua disediakan oleh alam. Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (*vertikal*) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (*horizontal*) pada umat manusia dan lingkungan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini bermanfaat sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat “membangkitkan kesadaran ke-Tuhanan” (Triyuwono, 2006).

Penjelasan singkat di atas secara implisit dapat kita pahami bahwa *shariah enterprise theory* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh Antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *shariah enterprise theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia disini hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia dan alam semesta dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat didalamnya (Triyuwono, 2007).

B. Tauhid

Muhammad (2007) menjelaskan bahwa Tauhid adalah seorang hamba yang meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa, tidak ada sekutu bagiNya dalam *rububiyah* (ketuhanan), *uluhiyah* (ibadah), Asma` dan SifatNya. Menurut Syaikh Yahya (2008) terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Tauhid *Rububiyah* (Keesaan Allah dalam ketuhananNya).

Tauhid *Rububiyyah* yaitu hendaknya hamba meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang Esa, Yang Menciptakan serta memberi rizki dan mengatur alam dengan sendirian. Dia yang mengatur semua makhluk dengan nikmatnya, khususnya para *anbiya'* dan pengikutnya yang berakhidah shalihah, berakhlak baik, ilmunya bermanfaat serta baik amalannya. Inilah *tarbiyah* (pendidikan) yang sangat bermanfaat untuk hati dan ruh demi mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Mustaffa (2011) mengutip dari Tafsir Al Manar menuliskan bahwa Tauhid *al Rububiyyah* yang ditafsirkan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Rida sebagai tauhid kekuasaan. Ia membawa maksud mengaku dan mengiktiraf bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, pencipta seluruh alam dan pemiliknya. Allah yang menciptakan, memberi rezeki kepada semua makhluk, menghidup dan mematikan sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Hanya Allah yang memberi mudharat, manfaat dan kesenangan kepada seseorang. Allah pula yang menerima permohonan hambanya dan Dialah yang mentadbir, mengurus perjalanan alam ini dan berkuasa melakukan sesuatu menurut kehendakNya, dan tidak ada daya dan kuasa yang mampu menandingi kekuasaanNya. Bagi Sayyid Muhammad Rasyid Rida, Tauhid *al Rububiyyah* diiktiraf oleh semua umat manusia baik seseorang itu Islam atau sebaliknya,

kecuali orang-orang yang tidak percaya kepada kewujudan tuhan seperti golongan Atheis. Oleh karena itu, jika seseorang hanya percaya kepada tuhan dan percaya kepada tauhid ini saja dan tidak kepada tauhid yang lain, dia tidak boleh dianggap sebagai seorang muslim, karena untuk menjadi muslim yang sebenarnya seseorang itu perlu mengakui dan menyakini Tauhid *al Rububiyyah*, Tauhid *al Uluhiyyah* dan Tauhid *al Asma' wa al Sifat*.

2. Tauhid *Uluhiyah* (Keesaan Allah dalam peribadatan).

Tauhid ini disebut juga tauhid ibadah, yaitu mengilmui dan mengakui hanya Allah lah yang berhak atas *uluhiyah* dan *ubudiyah* dari seluruh makhluk, mengkhususkan segala bentuk peribadatan hanya kepadaNya dan memurnikan hanya untuk Allah saja. Tauhid *Uluhiyah* menuntut adanya tauhid *Rububiyah* dan Tauhid *Asma' wa sifat*. Tauhid ini mencakup keduanya sebab tauhid ini adalah salah

satu sifat yang mencakup segala sifat kesempurnaan, termasuk di dalamnya sifat-sifat *rububiyah* dan keagungan. Sesungguhnya Dia adalah "*al-Ma'luh*" (yang diilahkan) dan "*al-Ma'bud*" (yang diibadahi), karena Dialah yang memberi segala keutamaan dan kebaikan kepada para hambaNya. Ke Esaan Allah dengan segala sifat kesempurnaan dan ke EsaanNya dengan *Rububiyah*Nya menuntut pengesaan terhadap *Uluhiyah*Nya, yaitu agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Semua Rasul menyeru kepada tauhid ini. Mereka melarang kesyirikan dan berbagai macam tandingan, khususnya dengan Muhammad dan Al Qur'an. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan perkara ini dan mewajibkannya dan Dia telah menetapkannya dengan penetapan yang agung dan menjelaskannya dengan penjelasan yang agung pula. Ia mengabarkan

bahwa tidak ada kebahagiaan dan keberhasilan kecuali dengan tauhid ini. Semua dalil aqli, alamiah, dan kejiwaan merupakan bukti yang menunjukkan tauhid ini serta kewajibannya. Tauhid adalah hak Allah yang wajib. Memandang bahwa tauhid *al Uluhiyyah* ini mempunyai pertalian yang rapat dengan pengabdian atau pengibadatan kepada Allah, lantas pengertian tentang ibadat perlu dipahami dengan baik oleh setiap umat Islam, karena ibadat merupakan suatu nama bagi sesuatu yang disukai Allah yang berbentuk perkataan maupun perbuatan. Oleh karenanya, ia perlu dilakukan dengan ikhlas kepada Allah dan tidak disertakan dengan unsur syirik juga sesuatu yang lain. Apabila seseorang itu beriman dengan tauhid *al Uluhiyyah*, maka secara langsung dia beriman dengan tauhid *al Rububiyyah* dan tauhid *al Asma' wa al Sifat*, karena tauhid *al Uluhiyyah* merangkumi tauhid-tauhid yang lain, namun tidak sebaliknya.

Tauhid *al Uluhiyyah* berasaskan pengakuan terhadap keesaan Allah yang terangkum dalam lafaz *Laa Ilaaha Illa Llaah* yang artinya Tiada Tuhan melainkan Allah. Pengakuan itu selaras dengan firman Allah pada Q.S. Adz-Dzariaat ayat 56:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR
 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahan:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Menurut Mustaffa (2011) pada Sayyid Muhammad Rasyid Rida, umat Islam dituntut memahami pengertian dan tuntutan tauhid *al Uluhiyyah* ini memandang ia merupakan agenda dakwah Nabi Muhammad SAW yang paling

utama. Ia juga merupakan agenda para Rasul sebelum Baginda Muhammad SAW, yang berorientasikan seruan mengajak umat manusia beriman kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh nabi Nuh, Hud, Saleh, Syu'ayb dan nabi-nabi lain. Ia ditegaskan oleh Allah menerusi firmanNya pada Q.S. Al Anbiya ayat 25:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

Terjemahan:

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".

3. Tauhid Asma' was-Sifat (Keesaan Allah dalam asma' dan sifatNya).

Tauhid *Asma' wa Sifat* yaitu meyakini secara mutlak akan keEsaan Allah yang Maha mulia dengan segala kesempurnaanNya, dan dengan sifat-sifatNya yang agung, mulia lagi indah yang tiada sekutu bagiNya dalam bentuk apapun. Yang demikian itu dengan cara menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk diriNya atau yang telah ditetapkan Rasul akan keagungan dan kemuliaan nama dan sifatNya, memahami secara benar tentang makna dan hukumnya sesuai yang dimaksud dalam Al Qur'an dan As Sunnah tanpa adanya *penafian* (meniadakan), *ta'thil* (menghilangkan), *tahrif* (merubah) maknanya dan *tamtsil* (menyerupakan) dengan yang lain dan juga menafikkan apa yang Allah nafikkan untuk diriNya atau yang dinafikkan Rasul untukNya, seperti sifat-sifat cela, aib, kekurangan dan hal-hal yang bisa menghilangkan kesempurnaanNya.

Nama-nama Allah banyak terdapat di dalam al-Qur'an dan disebut secara berulang kali di beberapa tempat yang berlainan. Rahasia pengulangan ini

dipaparkan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Rida dengan mengatakan bahwa ia adalah sebagai peringatan kepada umat Islam tentang kedudukan pencipta yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Pengulangan itu juga dapat menambahkan rasa keagungan dan kecintaan kepada Allah, mengharapkan rahmat dan ihsanNya serta takut kepada azab siksaan Allah khususnya bagi orang yang tidak menerima petunjuk Al Qur'an. Sehubungan dengan itu terdapat banyak ayat yang menyeru beriman kepada Allah, yang menumbuh dan meneguhkan konsep tauhid dan mengangkat umat Islam kepada derajat yang berbeda tingginya yaitu melanjutkan Ma'rifatnya kepada Allah. Bergantung dan cinta kepadaNya dengan memperbanyak ucapan *tanzih*, *takdis* dan tasbih kepadaNya, serta pembagian harta dan pengurusan harta benda (Mustaffa 2011).

Hakikat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah SWT, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainNya tanpa sebab atau perantara. Seseorang melihat yang baik dan buruk, yang berguna dan yang berbahaya dan semisalnya, semuanya berasal dari Allah SWT. Seseorang menyembahNya dengan ibadah mengesakanNya dan tidak menyembah kepada selain Allah. Menurut Arifin (2009) Para ulama secara umum menyebutkan bahwa sumber utama ilmu tauhid adalah al-Qur'an dan al Hadits, dan sumber lain yang digunakan adalah akal. (Razak, 2006 : 15-26), mengemukakan bahwa sumber-sumber ilmu tauhid adalah Al Qur'an, Al Hadits, Pemikiran Manusia, dan Insting. Adapun dalam buku "Buku Pintar Akidah" mengemukakan bahwa sumber pengambilan akidah ada tiga yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits dan Akal Sehat. Sedangkan Ramli (2009) mengemukakan bahwa dasar-

dasar akidah ahl *as-sunah wa al-jama'ah* adalah Al Qur'an, Al Hadits atau sunnah Nabi SAW, Ijma' Ulama, dan Akal.

C. Akad

Akad menjadi salah satu bagian dari ilmu *fiqh* muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta urusan keduniawian. Transaksi antar satu pihak dengan pihak lainnya adalah interaksi yang tidak terhindarkan karena setiap orang memiliki beragam kebutuhan dalam hidup. Dalam transaksi yang terjadi, muncul sebuah kesepakatan yang didasari antar keterikatan antar satu sama lain dalam *ijab* dan *qabul*. Inilah yang disebut dengan akad dalam Islam. Akad tersebut digunakan dalam melakukan suatu transaksi maupun kerja sama dengan orang lain. Dalam hukum Islam, *aqd* artinya gabungan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul merupakan penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

Rukun akad terdiri dari 3 hal utama yaitu *aqidan*, *mahal al-aqd* dan *sighah*. *Aqidan* adalah pihak-pihak yang akan melakukan akad kemudian *mahal al-aqd* adalah objek akad berupa jasa atau benda berharga, sedangkan *sighah* adalah pernyataan resmi adanya transaksi. Pihak yang akan melakukan akad haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola harta dengan baik (*rusyd*), baligh dan berakal sehat. Sementara itu objek akad haruslah sesuai dengan syaria Islam, jelas, dan tidak mengandung unsur *gharar*

(ketidakpastian). Selain gharar, hal-hal yang bisa membatalkan akad adalah riba dan *maisir* (perjudian).

D. Audit Syariah

Audit Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti obyektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa keagamaan dan sosial ekonomi, dalam rangka untuk memastikan tingkat keterkaitan antara pernyataan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak yang berkepentingan (Hanifia, 2010). Sementara itu, Hameed (2008) mendefinisikan audit syariah sebagai proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti obyektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa sosial ekonomi, agama, dan lingkungan dalam rangka untuk memastikan tingkat korespondensi antara pernyataan syariat (hukum Islam), dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna. Dalam definisi Haniffa Hameed terdapat unsur sosial ekonomi, agama (prinsip syariah) dan lingkungan sebagai ruang lingkup dari audit syariah.

Dari sudut operasional, AAOFI melalui *Governance Standarts for Islamic Financial Institutions* (GSIFs) No. 2 mendefinisikan audit syariah adalah pemeriksaan suatu kepatuhan LKS terhadap Syariah, dalam semua kegiatan khususnya laporan keuangan dan komponen operasional lainnya dari LKS, yang terkena risiko kepatuhan namun tidak terbatas pada produk, teknologi yang mendukung operasi, proses operasional, orang-orang yang

terlibat dalam bidang utama risiko, dokumentasi dan kontrak, kebijakan prosedur dan kegiatan lain yang membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Yacoob, 2013 dan Mohiuddin, 2012).

E. Sharia Compliance

Sharia compliance adalah ketaatan atau kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip yang berlaku. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai yang ditentukan oleh prinsip Islam yaitu bagaimana bermuamalat yang baik sesuai syariah. Tuntutan Pemenuhan Prinsip syariah (*sharia compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Oleh karena itulah, jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Rahman El Junusi, 1833).

Arifin (2009) mengungkapkan makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Selain itu, *Sharia Compliance* juga merupakan salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah (Ansori, 2001). Kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya

kepatuhan tersebut adalah nilai perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan menurut (Adrian Sutedi, 2009), makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Adapun *sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariahh. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001). Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah pada lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah. Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan

identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami (Sutedi, 2009). Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah.

Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank (Sutedi, 2009). Dengan demikian, *sharia compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Wardayati, 2011). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

F. Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Sujanto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan mengawasi

bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah.

Untuk dapat memastikan dipenuhinya prinsip syariah, pengawasan kepatuhan syariah harus mencakup pengawasan terhadap dua hal, yaitu terhadap produk yang dikeluarkan bank dan operasional perbankan. Di bawah ini terdapat dua pengawasan yang dapat memastikan terpenuhinya prinsip syariah, diantaranya:

1. Pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan bank

Pengawasan terhadap produk dilakukan dengan dua tahap kegiatan, diantaranya:

- a. Tahap sebelum Penawaran Produk (*ex-ante*).

Pengawasan dalam tahap sebelum penawaran produk merupakan pengawasan pada saat bank syariah mempersiapkan suatu bentuk produk baru untuk ditawarkan pada masyarakat dan terhadap produk tersebut harus dapat dipastikan bahwa prinsip pengelolaannya serta segala bentuk bagi hasil maupun persyaratan dalam akad antara bank dengan pengguna produk tidak bertentangan dengan asas-asas syariah yang telah

ditentukan oleh hukum. Setelah kemudian produk tersebut dipastikan tidak bertentangan, maka produk dapat ditawarkan pada masyarakat. Namun, setelah ditawarkan, pengawasan kepatuhan syariah tidak berarti dihentikan begitu saja. Pengawasan tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk tertentu yang selama perencanaan sebelum ditawarkan telah memenuhi prinsip syariah, pada saat penggunaan faktual di masyarakat juga tetap memenuhi prinsip tersebut. Memenuhi prinsip syariah dalam tahapan ini tidak hanya berarti telah menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang, akan tetapi, juga harus dipastikan bahwa produk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pengguna maupun bagi bank syariah. Dalam tahapan ini, otoritas pengawas harus selalu melakukan pemantauan dan bila sewaktu-waktu ditemukan adanya pelanggaran, harus mampu mengevaluasi produk tersebut.

Dalam sistem perbankan syariah Indonesia, bentuk pengawasan tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap *ex ante* terlihat pada kewajiban pengawasan proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk pengawasan pada tahap ini juga ditegaskan melalui aturan khusus mengenai produk bank syariah yang mewajibkan bank syariah untuk melaporkan semua bentuk rencana pengeluaran produk baru guna dilakukannya review dan pemeriksaan menyeluruh yang salah satunya melihat adanya kepatuhan syariah dalam produk tersebut.

- b. Tahap setelah produk ditawarkan dan digunakan oleh masyarakat (*ex-post*).

Pengawasan terhadap tahap *ex-post* terlihat dalam ketentuan untuk menghentikan produk yang tidak memenuhi ketentuan syariah, salah satunya bila tidak memenuhi prinsip syariah dan terhadapnya harus dilakukan penyempurnaan.

2. Operasional Perbankan

Khusus mengenai pengawasan terhadap operasional bank syariah dijelaskan melalui kewajiban melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan, penyaluran dana serta pelayanan jasa oleh bank syariah.

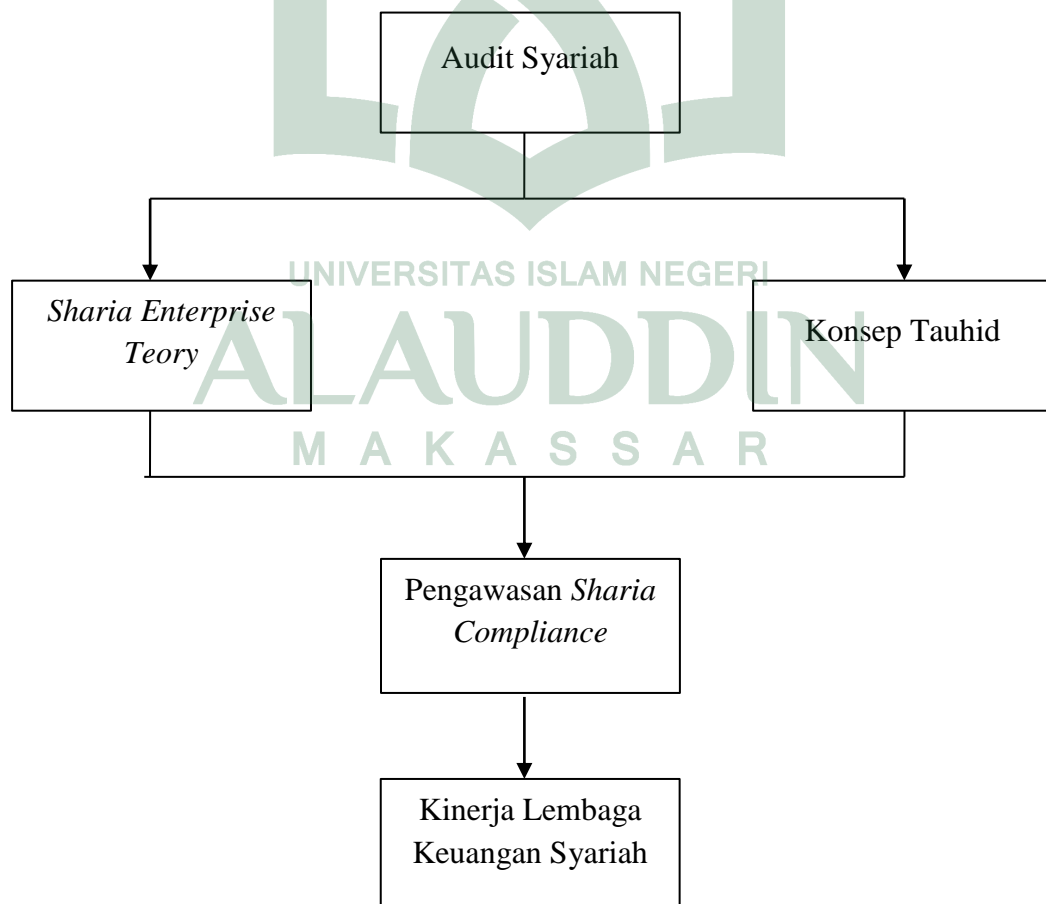
G. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepada prinsip syariah. Tujuan utama pendirian LKS sebagai lembaga keuangan yang menerapkan pada prinsip syariah agar kaum muslimin terhindar dari Lembaga Keuangan (LK) konvensional yang menggunakan sistem bunga (*riba*) yang diharamkan oleh syariah. Selain itu, lembaga keuangan konvensional juga tidak mempertimbangkan aspek kehalalan dalam investasi baik objek ataupun caranya (Antonio, 2001). LKS menjalankan usahanya, bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan *sharia compliance audit* diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Perangkat mekanisme jaminan kepatuhan syariah melalui peran DPS merupakan perangkat yang membedakan antara audit syariah pada

LKS dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dikarenakan LKS memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip syariah dan kegiatan usahanya.

Chapra dan Ahmed (2002) menggambarkan peran kunci dalam struktur GCG Lembaga Keuangan Syariah. Selain struktur normal, GCG sebagaimana yang terdapat pada lembaga keuangan konvensional, seperti direksi, audit internal dan lainnya. Kegiatan LKS harus senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Chapra dan Ahmed (2002) juga menjelaskan peran penting audit internal membantu DPS untuk memastikan kepatuhan LKS terhadap prinsip syariah.

H. Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun ke lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut *field study*. Menurut Sugiyono (2010:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Maleong (2012: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian alamiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena

didasarkan pada dua alasan; pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual.

Kedua, pemulihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya. Berdasarkan pendekatan ini, peneliti mengakumulasi, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen laporan keuangan mengenai pengawasan kepatuhan syariah. Menurut Sudjana (2009), penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting. Riset ini akan menganalisis tentang audit syariah dalam melakukan pengawasan praktik *sharia compliance* pada perbankan syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Niaga Madani Makassar berlokasi di Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. BPRS Niaga Madani Makassar dipilih karena merupakan salah satu dari Bank Syariah yang merupakan bank syariah dengan kepemilikan aset besar di Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam studi fenomenologi tidak tertarik mengkaji aspek-aspek kausalitas dalam suatu peristiwa, tapi berupaya menggeledah tentang bagaimana orang melakukan sesuatu pengalaman beserta makna pengalaman itu.

Metode yang digunakan adalah deskriptif, dan bertujuan mengungkap intensionalitas, kesadaran dan “dunia kehidupan” (Kuper dan Kuper, ed., 1996: 749). Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Temuan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi. Studi ini diakhiri dengan esensi dari makna (Creswell, 1998: 40). Suatu fakta yang diteliti dalam perspektif fenomenologi bersifat subjektif, yakni berdasarkan penuturan para subjek yang mengalami fakta atau fenomena yang bersangkutan.

Studi fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena (*lih.* Denzin dan Lincoln, 1988: 64). Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yakni :

1. *Textural description* yaitu apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, serta hal yang terjadi secara empiris.
2. *Structural description* yaitu bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya, deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu.

Teknik pengumpulan data utama dalam studi fenomenologi adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Untuk memperoleh hasil wawancara yang utuh, maka wawancara itu harus direkam. Kelengkapan data dapat

diperdalam dengan menggunakan teknik lain, seperti observasi partisipan, penelusuran dokumen, dan lain-lain.

C. Instrument Penelitian

Ada tiga unsur penting yang harus diperhitungkan dalam menentukan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih peneliti adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diinginkan adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara interview atau wawancara terstruktur. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga atau *literature*, dokumentasi.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) terhadap suatu objek secara langsung sebagai informan penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara

langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah, dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. Misalnya mengenai sejarah dari bank Mandiri itu sendiri.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data hasil wawancara serta data sekunder berupa laporan keuangan yang pernah diterbitkan oleh entitas tersebut serta dokumentasi laporan pertanggung jawaban sosialnya.

4. *Internet Searching*

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari *internet* guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proes tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode interpretif. Diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang berhubungan

dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah. Karena penelitian ini menggunakan metode interpretif maka penyajiannya hanya sebatas pemaparan antara data yang diperoleh dengan teori untuk menjawab permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penilaian ini, dan implikasi positif yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data melalui empat pengujian, yaitu *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (*reliabilty*) dan *confirmability* (obyektivitas). Namun dalam penelitian ini pengujian keabsahan data hanya digunakan dalam dua uji yang paling sesuai, yaitu validitas internal (kredibilitas) dan reliabilitas (*dependabilitas*).

1. Uji Validitas Internal (Kredibilitas)

Uji Validitas internal (kredibilitas) data adalah uji kebenaran data. Tingkat kredibilitas yang tinggi dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut mengerti benar tentang berbagai hal yang telah diceritakannya (Afiyanti, 2008). Dalam penelitian ini uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan bermacam cara, dan berbagai waktu. Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya melalui sumber data utama yaitu wawancara, peneliti dapat memperoleh sumber data pendukung seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data atau keterangan dari informan lebih akurat.
- b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan teori yang relevan, dalam penelitian ini teori etika kebajikan dan konsep teori prospek. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias.

2. Uji Reliabilitas (dependabilitas)

Uji reliabilitas (dependabilitas) data menjadi pertimbangan dalam menilai keilmiahannya suatu temuan penelitian kualitatif. Tingkat dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti lain akan dapat membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif, data mentah dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan (Alfiyanti, 2008). Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau

mereplikasi proses penelitian tersebut (Sugiyono, 2013: 277) Untuk Pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar.

Perbankan syariah lahir dari kombinasi idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang berlandaskan sistem operasionalnya. Penggabungan antara kedua komponen itulah yang menjadi pembeda sekaligus merupakan keunggulan dari bank syariah sebagai alternatif jasa perbankan. Dengan tujuan sederhana memberikan rasa adil baik dalam berinvestasi maupun berusaha secara universal tanpa membedakan ideologi dan lainnya serta pemberdayaan untuk ekonomi ummat, maka pada tanggal 1 Oktober BPR Syariah Fastabiqul Khairat yang sebelumnya beroperasi di kabupaten Pinrang, pindah ke kota Makassar. Namun setelah beberapa bulan kemudian beroperasi di Makassar, BPR Syariah Fastabiqul Khairat tidak mengalami kemajuan sampai akhirnya di akuisisi oleh Ir. H. Mubyl Handaling yang memiliki cukup pengalaman dalam dunia perbankan serta keahliannya dalam mengelola koperasi simpan pinjam, maka setelah beberapa lama selang waktu BPR Syariah Fastabiqul Khairat mengalami kemajuan yang cukup pesat, dan kemudian BPR Syariah Fastabiqul Khairat berganti nama menjadi BPR Syariah Niaga Madani pada tanggal 11 februari 2003 sesuai keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C22851-HT 01.01.04 tahun 2002 dan.

surat keputusan pimpinan Bank Indonesia Makassar tanggal 20 November 2002 No.5/1/PBI/MKS/2003 tanggal 11 Februari 2003.

Seiring berjalannya waktu serta keinginan yang kuat dari sluruh elemen-elemen terkait, BPR Syariah Niaga Madani untuk pertamakalnya melakukan pengembangan usaha. Melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 7/18/DPBS/Makassar per tanggal 2 Maret 2005 tentang persetujuan pembukaan kantor cabang, maka pada tanggal 7 Maret 2005 BPR Syariah Niaga Madani menorehkan sejarah dalam perkembangan BPRS di Sulawesi Selatan dengan membuka kantor cabang pertamanya di kabupaten Wajo. Guna memberikan pelayanan yang lebih luas khususnya di kota Makassar, maka pada tanggal 2 Oktober 2006 BPR Syariah Niaga Madani mengoperasikan kantor pelayanan kas di Jl. Abd Dg. Sirua Makassar sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.8/22 DpbS/MKS per tanggal 31 Oktober 2006.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor mikro, BPR Syariah Niaga Madani memberikan kontribusi dengan memperluas jaringan operasional yakni membuka kantor cabang sebanyak 3 kantor serta kantor kas sebanyak 6 kantor. Kemudian untuk kedepannya manajemen manajemen akan kembali menargetkan pembukaan kantor cabang sebanyak 4 (empat) kantor dan 10 (sepuluh) kantor kas, guna memberikan kemudahan bertransaksidsn mengakses produk-produk BPR Syariah Niaga Madani diseluru kabupaten atau kotamadya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

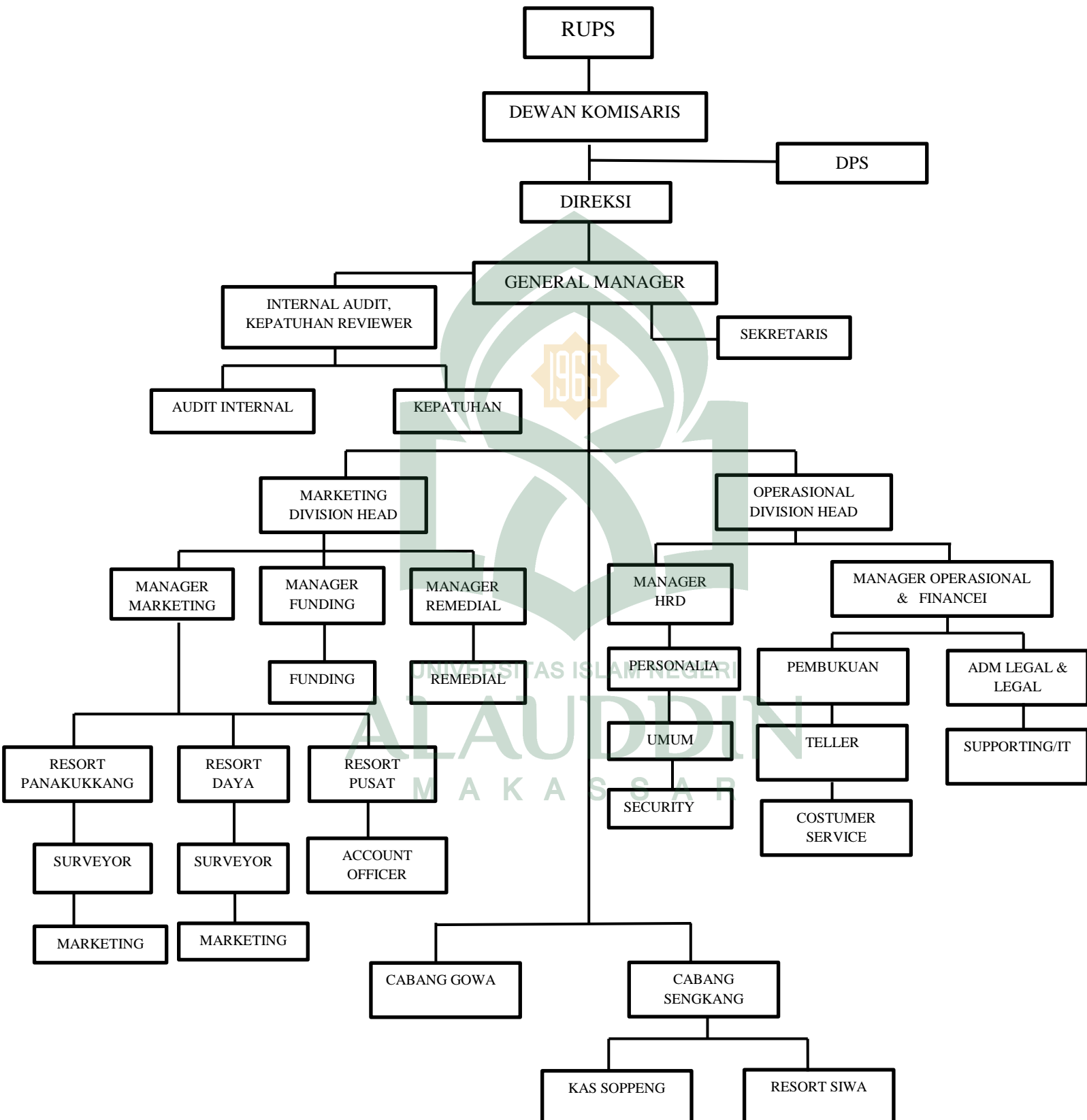
Dengan tekad menjadikan kualitas dan profesionalisme yang dilandasi dengan manajemen yang enerjik sebagai budaya perusahaan dan pengawasan melekat pada seluruh elemen yang ada di BPR Syariah Niaga Madani serta dukungan Dewan Komisaris yang juga sekaligus pemegang saham, merupakan tokoh yang sudah memiliki reputasi yang sangat baik dan dikenal dimasyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan tokoh masyarakat dan Ulama, sehingga InshaAllah akan menjadikan BPR Syariah Niaga Madani sebagai lembaga keuangan mikro yang terdepan dan terpercaya dimasa-masa yang akan datang.

2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani

Adapun visi dan misi dari BPR Syariah Niaga Madani yaitu sebagai berikut :

- a. Visi: menjadi BPR Syariah yang terkemuka di Indonesia Timur yang menjadi pilihan untuk berkarya.
- b. Misi:
 - Memberikan kesejahteraan pada karyawan
 - Memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat
 - Memberikan keuntungan yang optimal
 - Iku serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas



B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian mengenai Peran Audit Syariah dalam Pengawasan *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar berfokus pada 3 pokok masalah, yaitu meliputi peran audit kepatuhan syariah (*sharia compliance audit*), kerangka kerja audit kepatuhan syariah (*sharia compliance audit*), dan konsep tauhid pada pengimplementasian audit kepatuhan syariah (*sharia compliance audit*).

1. Peran Audit Syariah dalam Pengawasan *Sharia Compliance*.

Pihak yang memainkan peran kunci dalam keseluruhan audit dan kerangka tata kelola perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (Kasyim dan Sanusi, 2013; Karim, 1990). Peran DPS atau auditor syariah adalah untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatannya, termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan serta melakukan *sharia review* yang merupakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan dibantu oleh auditor internal sebagai pengawas harian, DPS menjalankan perannya sebagai *sharia review* (Yacoob, 2012). Sebagai yang dipaparkan oleh ibu Nurul Nabila selaku (HRD) pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar:

”Jadi, audit kepatuhan syariah pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar dilakukan oleh DPS yang dibantu oleh auditor internal. Jadi, auditor syariahnya adalah anggota DPS.”

Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar melakukan audit syariahnya dengan dibantu audit internal. Audit Internal atau internal audit memiliki peran yang penting dalam operasional perusahaan. Perkembangan manajemen organisasi pada era modern ini sangat memerlukan peran audit internal khususnya pada perusahaan. Audit Internal digunakan untuk mendukung berjalannya manajemen perusahaan sebagai fungsi *controlling* yang menjamin perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan. Adapun tugas dari internal audit yang dilakukan auditor adalah melakukan pemeriksaan internal perusahaan dengan menjamin sistem atau manajemen yang ada di perusahaan supaya berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Selain itu, dengan adanya audit internal dapat menghindari adanya resiko kesalahan, penyalahgunaan, dan kendala dengan mengembangkan efisiensi serta efektivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan semestinya menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) audit internal serta melakukan pengendalian internal audit dalam perusahaan dengan tujuan pengembangan perusahaan. Auditor internal juga harus memastikan hal-hal yang terkait dengan peraturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen manajemen.

Audit kepatuhan syariah merupakan proses pemeriksaan atas kepatuhan seluruh aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lain yang memerlukan ketaatan atau kepatuhan terhadap prinsip syariah (Yacoob, 2013:

90). Sesuai dengan yang dipaparkan oleh bapak Abd. Rasyid Enjang selaku DPS pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar, yaitu:

“Jadi, peran dari audit syariah disini yakni pemeriksaan hal-hal mengenai laporan keuangan, audit kepatuhan, produk, layanan, serta karyawan yang dilakukan oleh auditor syariah dalam hal ini DPS, untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif dengan tujuan memastikan sistem pengendalian internal yang efektif untuk kepatuhan syari’ahnya”

Berikut adalah peran dari audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* (kepatuhan syariah):

a. Audit Laporan Keuangan.

Audit laporan keuangan pada LKS yaitu memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan mendapat opini *compliance* (patuh) dari auditor syariah sesuai dengan nilai, prinsip, dan hukum syariah.

b. Audit produk bank syariah

Dewan Pengawas Syariah yang memiliki ahli dalam hukum-hukum Islam dan berfungsi untuk memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah kemudian bersama dengan dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya. Intinya, tugas utama dari Dewan Pengawas Syariah ini adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari aturan syariah (Antonio (2010:1580). Produk-produk dari bank syariah meliputi :

1) Produk Penyalur Dana.

Dalam penyaluran dana terhadap nasabah, produk pembiayaan syariah dibagi menjadi 3 yaitu; transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki suatu barang menggunakan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa maka menggunakan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan untuk kerjasama menggunakan prinsip bagi hasil.

2) Produk Penghimpun Dana.

Terdapat dua prinsip dalam produk penghimpun dana yakni mudharabah (Deposit & tabungan), dan Wadiah (titipan) berupa uang atau barang milik nasabah kepada pihak bank sebagai penerima objek titipan. Sebagaimana dirujuk pada Q.S An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

3) Produk Jasa Keuangan.

Selain dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut berupa *Sharf* (jual beli valuta asing) serta *ijarah* (sewa).

Jadi, mekanisme pengawasan DPS dilakukan setidaknya 6 bulan sekali untuk menganalisa operasional Bank Syariah dan menilai kegiatan maupun produk-produk bank syariah sudah sesuai dengan prinsip *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah akan dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah apakah sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) kemudian menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada kepada direksi, komisaris, DSN, serta Bank Indonesia.

c. Audit (Pengawasan) Pelayanan

Tugas mengawasi, memeriksa, serta mengontrol kebijakan pelayanan pada bank syariah adalah amanah untuk DPS yang diberikan oleh pihak perusahaan dan mitra. Konsekuensinya adalah memberikan pelayanan yang maksimal melalui pelaksanaan tanggungjawab. Karena DPS merupakan bagian dari *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) yang pertanggungjawabannya dinilai dari sisi “tunduk dan patuh” menjalankan syariah Islam.

d. Pengawasan SDM (Karyawan)

Pengawasan untuk menilai kepatuhan karyawan bank syariah terhadap kebijaksanaan, prosedur, dan aturan-aturan yang dibuat bank tersebut juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga proses atau kegiatan perbankan yang mereka lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus sesuai dengan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) yang merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip pada lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Yang dimana budaya kepatuhan tersebut merupakan nilai, perilaku serta tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, tanggal 12 Januari, 2011.

Dalam melaksanakan aktifitas operasional agar sesuai dengan prinsip syariah, DPS tidak hanya melaksanakan kewajiban sebagai pengawas, namun adanya DPS merupakan tempat konsultasi perbankan agar menerapkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam menjalankan mekanisme operasional karena mengedepankan kesadaran akan ketuhanan. Seorang auditor syariah memiliki kewajiban untuk mengawasi bahwa informasi kebenaran yang disajikan dalam laporan keuangan serta hadir sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan operasional keuangan syariah berdasarkan hukum syariah (Shaafek, 2013).

Menurut (Kasim, 2009), audit dalam keuangan Islam memiliki fungsi sosial yang harus memberikan manfaat bagi umat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan mampu direalisasikan apabila auditor syariah tidak berdiri secara mandiri. Peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga juga mengawasi *sharia compliance*. Auditor harus independen baik dalam bersikap maupun

kelembagaan (Kasim & Sanusi, 2013). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Abd Rasyid Enjang selaku DPS pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar:

“Dalam menjamin independensi auditor syariah, tentu saja harus memberikan tuntutan penting yaitu dari aspek religiusitas dan aspek *professional skepticism*, terutama dalam menganalisis validitas dari bukti transaksi suatu akad pada BPRS Madani Makassar dengan mengkonfirmasi langsung pada nasabah ketika melakukan uji sampelnya. Jika kedua aspek ini terpenuhi maka akan aman dan di BPRS Madani Makassar ini sendiri harus mengedepankan kedua hal tersebut.”

Sifat independensi DPS mengfokuskan pada kesetiaan Institusi ajaran Islam untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada tekanan dari manajemen. Tentu saja, kesanggupan untuk nilai-nilai religius dan kewajiban religius mengharuskan DPS untuk mandiri. Dari sisi lain, tidak berarti bahwa ketegangan antara manajemen dan auditor syariah tidak mungkin ada apabila manajemen cenderung untuk memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan religius (Karim, 1990). Selama ini berkembang keraguan independensi auditor syariah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan audit syariah hanya dilaksanakan dalam lingkup internal, rentan terjadi kecurangan dalam hasil audit yang tujuannya untuk meningkatkan penilaian pihak eksternal terhadap kinerja LKS tersebut (Aprillianto *et al.*, 2017).

a) Religiusitas

Religiusitas adalah internalisasi nilai agama dalam diri seseorang dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama. Kepercayaan ini yang nantinya diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari baik dalam hati maupun dalam ucapan. Akuntan harus berperilaku konsisten dengan keyakinan akan

nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Semua perilaku dan tindakan harus difilter dan didororong oleh nilai-nilai Islam, dan bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lain pada kesehariannya.

Keberagaman diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Dalam pernyataan pertama etika Islam supaya manusia memiliki perilaku yang baik dengan mengikuti ajaran Islam dalam mencapai keridhaan Allah. Agama memiliki pengaruh cukup besar dalam pembentukan sikap karena agama meletakkan dasar konsep moral dalam diri individu. Garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak diperbolehkan serta hal-hal antara yang baik dan yang buruk diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama. Glock dan Stark dalam Ma'zumi (2017) memandang dimensi religiusitas meliputi hal-hal berikut:

- 1) Dimensi Keyakinan Ideologis
- 2) Dimensi Praktik Keagamaan
- 3) Dimensi pengalaman Religius
- 4) Dimensi Pengetahuan Agama, dan
- 5) Dimensi Konsekuensi.

Pengukuran lainnya adalah dengan menggunakan empat dimensi yaitu: *Associational* (frekuensi keterlibatan seseorang dalam kegiatan ibadah dan do'a), *Communal* (pilihan dan frekuensi hubungan seseorang dengan orang lain), *Doctrinal orthodoxy* (penerimaan intelektual terhadap doktrin-doktrin keagamaan), *Devotionalism* (hubungan seseorang dengan Tuhan melalui meditasi). Dalam

pengukuran lain juga, empat dimensi terdiri dari kepercayaan (*believe*), pengetahuan (*knowledge*), praktik (*practice*) dan pengalaman (*experience*). Semakin tinggi dimensi ini, maka semakin tinggi pula religiusitas seseorang.

b) Profesionalitas

Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Seseorang yang professional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seseorang professional memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan. Konsep profesionalisme auditor menjadi hal yang penting karena merupakan asset penting dimana auditor itu bekerja sebagai indikator keberhasilan dan diharapkan auditor yang mempunyai profesionalisme yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Lembaga Keuangan Syariah serta memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya (Syahrir, 2002).

Dewan Pengawas Syariah sebagai auditor syariah, di samping mempunyai keahlian dan kecerdasan teknis, dituntut untuk harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan masyarakat, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan. Maka tuntutan profesionalisme seorang Auditor Syariah BPR Syariah Niaga Madani akan meningkatkan independensi dan hasil kerja auditor syariah. Menurut Hall R dalam Syahrir (2002), mengukur konsep profesionalisme auditor adalah dari sikap dan perilaku, yang tercermin dalam lima dimensi:

- 1) Pengabdian pada profesi, yang tercermin dalam dedikasi professional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.
- 2) Kewajiban social, yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh professional karena adanya pekerjaan tersebut.
- 3) Kemandirian, yaitu suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.
- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi, yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- 5) Hubungan dengan sesama profesi, berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan dan pedoman, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide pertama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para professional membangun kesadaran profesinya.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), seorang auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional atau *Professional Skepticism* yaitu sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. Keseimbangan antara dua sikap ini tergambarkan dalam perencanaan audit dengan prosedur audit yang dipilih akan dilakukannya. Dalam praktiknya, auditor seringkali diwarnai secara psikologis yang kadang terlalu curiga ataupun sebaliknya terhadap asersi manajemen. Padahal seharusnya seorang auditor secara profesional menggunakan kecakapannya

untuk menyeimbangkan (*balance*) antara sikap curiga dan sikap percaya tersebut. Inilah yang kadang sulit diharapkan, apalagi pengaruh-pengaruh di luar diri auditor yang bisa mengurangi sikap skeptisme profesional tersebut. Pengaruh itu berupa *self serving bias* karena auditor dalam melaksanakan tugasnya mendapat imbalan dari auditee. Auditor dalam auditnya harus menggunakan kemahiran secara profesional dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan dalam pemeriksaan menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan.

Kedua aspek tersebut merupakan kewajiban bagi DPS sebagai pemegang peranan besar dalam meyakinkan masyarakat bahwa BPR Syariah Niaga Madani sudah benar-benar sesuai syariah karena terdapat fungsi kontrol dari auditor syariah secara langsung dalam proses kegiatan operasional. Maka dengan adanya jaminan ini, diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan BPR Syariah Niaga Madani Makassar. Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa penilaian masyarakat terhadap independensi berpengaruh sangat besar bagi apresiasi baik terhadap bank syariah. Jika terjadi suatu masalah pada bank syariah yang diakibatkan oleh kesalahan auditor syariah, apalagi hal tersebut berhubungan dengan pelanggaran independensi, sehingga hal ini diketahui oleh masyarakat, maka besar kemungkinan hal ini akan digeneralisasikan sehingga jika masyarakat menyimpulkan bahwa auditor syariah gagal mempertahankan independensinya, maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap laporan yang dikeluarkan auditor syariah.

Proses audit syariah membutuhkan batasan yang menentukan sejauh mana proses audit itu perlu dilakukan. Batasan audit syariah ini dapat untuk membentuk ruang lingkup auditor dalam melakukan pemeriksaan. Tujuannya agar tugas kerja dari seorang auditor syariah dapat ditentukan dengan jelas (Aprillianto 2017). Subjek audit syariah adalah laporan keuangan yang akan dinilai apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak (Peni 2012). Namun menurut (Hameed 2009) bahwa dari prespektif Islam, tidak hanya laporan keuangan sebagai subjek audit tapi seluruh lembaga, tujuan, proses, karyawan, kinerja keuangan dan non keuangan merupakan subjek audit.

Ruang lingkup pemeriksaan audit tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, namun saat ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat maka lingkup audit pun semakin berkembang luas pada hal-hal diluar laporan keuangan, yakni seperti audit kinerja, audit lingkungan, audit SDM dan lain-lain. Lingkup audit tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan laporan keuangan ataupun aktivitas ekonomi perusahaan tetapi hal yang lebih luas di luar daripada itu (Mardiyah dan Mardian, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, beberapa tahun belakangan audit syariah mulai berkembang seiring pesatnya perkembangan LKS saat ini.

Audit syariah sangat berbeda dengan audit konvensional. Aspek religiusitas menjadi landasan utamanya, hal inilah yang tidak terkover oleh apapun bentuk audit konvensional saat ini. Karena tujuan utama audit syariah adalah memastikan perusahaan telah melaksanakan semua hukum ekonomi yang berlaku, termasuk

hukum dan prinsip Islam terkait hal itu. Menurut pemaparan dari Bapak Abd Rasyid

Enjang selaku Dewan Pengawas Syariah:

“Ruang lingkup dalam audit syariah pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar yakni Audit atas Laporan keuangan, audit kepatuhan syariah dan aspek-aspek operasional bank Syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sudah *compliance*, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan audit kepatuhan syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek syariah LKS secara menyeluruh yakni mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk, aspek operasional dan aspek manajerial lembaga. Sehingga mulai dari produk, operasional hingga manajemen LKS dapat dipastikan kepatuhannya terhadap syariah.”.

AAOIFI sudah merepresentasikan ruang lingkup audit syariah itu sendiri, yaitu sebuah audit syariah memang semestinya mencakup tentang penilaian laporan keuangan syariah dan menilai kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah dalam mematuhi kesyariaannya itu sendiri, baik itu berkenaan dengan produk maupun operasional perusahaan secara umum. Rahman (2008), setidaknya ada 3 tahapan audit syariah yaitu:

- 1) Perencanaan, Pada tahap perencanaan, pemahaman dasar dari produk LKS sangat penting sehingga teknik atau prosedur, sumber daya dan ruang lingkup dapat disesuaikan untuk mengembangkan program audit.
- 2) Pemeriksaan, Pada tahap pemeriksaan, pemeriksaan yang lebih rinci dan tehnik pengambilan sampel yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa bukti-bukti audit yang terakumulasi dalam kualitas yang baik dan kuantitas.

- 3) Pelaporan. Pada tahap pelaporan, laporan audit syariah siap untuk memberikan keyakinan memadai dari kepatuhan syariah produk keuangan Islam.

2. Kerangka Kerja Audit Syariah dalam Pengawasan *Sharia Compliance*

Dalam pelaksanaan audit, kerangka kerja merupakan hal yang sangat penting karena kerangka kerja berfungsi sebagai acuan bagi auditor untuk melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan sehingga tidak semua aspek harus diperiksa oleh auditor, hanya yang memiliki resiko dan yang terkait yang harus diuji (Mardiyah dan Mardian, 2015). Kerangka kerja audit merupakan arahan, aturan, serta acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para stakeholder sebagai langkah dalam mengambil keputusan. Apabila kerangka kerja atau framework tersebut dikombinasikan dengan prinsip serta aturan syariah yang berlaku maka audit syariah dapat dilaksanakan dalam mengukur sejauh mana organisasi menaati aturan dan regulasi yang diberika Allah SWT dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran laporan keuangan yang disiapkan manajemen (Rahman, 2008). Dalam wawancara pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar dengan narasumber ibu Nurul Nabila selaku (HRD):

“Karena ini adalah Lembaga syariah, jadi dalam menjalankan proses auditnya, diperlukan adanya pedoman dari PSAK Syariah dan DSN-MUI. Dalam hal ini PSAK syariah sebagai pedoman dalam pemeriksaan laporan keuangannya sedangkan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam mengawasi

aspek syariah dari operasional BPRS ini sendiri seperti mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai serta prinsip hukum Islam (syariah).”

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum pada bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah untuk mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Faozan Arifin, 2010:9).

a. Fatwa DSN-MUI

Mulazid (2016), fungsi DSN-MUI adalah mengkaji, menggali serta merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kegiatan transaksi dan analisis produk serta jasa pada lembaga keuangan syariah. Adapun tugas dari DSN-MUI adalah:

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya,
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah,
- 4) Dan mengawasi penerapan fatwa.

Menurut pemaparan dari Ibu Nurul Nabila sebagai HRD Pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar, diluar dari laporan keuangannya, segala

bentuk operasionalnya mengacu pada DSN (Dewan Syariah Nasional). Di Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2008). Berikut ini adalah penjelasan mengenai ruang lingkup DSN dan DPS:

1. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin keIslaman keuangan syariah pada seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 pada tanggal 10 Februari 1999 (Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia: 2011). DSN merupakan Lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah maupun lainnya.

Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah serta pendorong penerapan nilai-nilai

prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN memiliki keanggotaan sebagai berikut:

- a) Dewan syariah nasional merupakan bagian dari MUI,
- b) Dewan syariah nasional, seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun aturan serta ketentuan untuk lembaga keuangan syariah
- c) Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mualamalah syariah
- d) Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti yang sama dengan periode pengurus MUI pusat yaitu lima tahun

Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 tahun 2000 mengenai pedoman dasar Dewan Syariah Nasional MUI, tugas utama Dewan Syariah Nasional antara lain menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2. Dewan Pengawas Syariah

Posisi penting Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi mendorong anggota DPS untuk memiliki pengetahuan dalam berbagai aspek seperti sumber syariah diantaranya seperti Al-Qur'an dan As-Sunah, praktek bisnis, keuangan aspek hukum, serta pemasaran dan bahkan akuntansi. Dalam pelaksanaan proses pembinaan dan pengawasan DPS terhadap perbankan syariah hanya merupakan pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, dimana dapat dilihat bahwa yang menjadi objek materil pengawasannya adalah segala produk dan jasa perbankan syariah sampai pada tahap pelaporan DPS ke DSM-MUI, direksi, komisaris dan Bank Indonesia hanya memuat hasil pengawasannya terhadap sebuah produk dan jasa atau kegiatan usaha.

Adapun wewenang dari Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana keputusan surat MUI No.Kep-98/MUI/2001 mengenai susunan Dewan Pengawasan Syariah MUI masa bakti periode 2000-2005 adalah sebagai berikut (Umam, 2013):

- a. melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya
- b. berkewajiban mengajukan dan mengusulkan pengembangan produk Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional
- c. melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah sekurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran

- d. merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama atas produk baru yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan Dewan Syariah Nasional. Adapun hal-hal mengenai pedoman pengawasan maupun pedoman penyampaian laporan hasil pengawasan telah diatur dalam surat edaran No.8/19/DPBS tanggal 24 agustus 2006 perihal pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh DPS sesuai dengan aturan ini disampaikan pada direksi, komisaris, dewan syariah nasional, serta bank Indonesia. Laporan hasil pengawasan syariah setidaknya harus memuat beberapa hal yaitu:

- a. hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional MUI.
- b. opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank
- c. hasil kajian dari produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI

- d. Opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

b. PSAK Syariah

PSAK Syariah yang ada saat ini diterapkan sebagai pedoman Lembaga Keuangan Syariah untuk membuat laporan keuangan serta menentukan tindakan dari berbagai aktivitas yang terkait dengan produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah hingga dapat mencerminkan *sharia compliance* serta menjadi pertimbangan tersendiri bagi para *stakeholders* (Mahmudah, 2015). PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, PSAK juga dibutuhkan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, serta memudahkan pembaca laporan keuangan entitas yang berbeda.

Dalam mengaudit laporan keuangan, sangat diperlukan pedoman pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini PSAK Syariah merupakan pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi yakni pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (Mahmudah, 2015). Maka, standar laporan keuangan berdasarkan dari kesesuaian komponen laporan keuangan dengan PSAK Syariah.

PSAK Syariah diadopsi dari AAOIFI yang merupakan lembaga regulasi keuangan Islam internasional. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam (Accounting and Auditing Standards for

Islamic Financial Institutions) (Mahmudah, 2015). Adapun PSAK Syariah yang telah dikeluarkan oleh IAI ialah (Wiroso, 2011):

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 2) PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 3) PSAK 102: Akuntansi Murabahah
- 4) PSAK 103: Akuntansi Salam
- 5) PSAK 104: Akuntansi Istishna
- 6) PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
- 7) PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
- 8) PSAK 107: Akuntansi Ijarah
- 9) PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Murabahah Bermasalah
- 10) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- 11) PSAK 110: Akuntansi Hawalah
- 12) PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Laporan keuangan LKS yang sesuai dengan PSAK Syariah akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Jadi, peran atas keberadaan PSAK Syariah yang maksimal, akan berimbas pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

3. Konsep Tauhid Pada Pengimplementasian Audit Kepatuhan Syariah

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum Syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama,

kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain (Anggadini, 2011:79). Oleh karenanya diperlukan pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Islam tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka di adakanlah “Dewan Pengawas Syariah” (Sumitro (2004: 51).

Pada pelaksanaan audit syariah, terdapat hal-hal yang membedakan dengan audit yang dilakukan pada lembaga konvensional lainnya karena dalam menjalankan aktivitas auditnya, ada regulasi-regulasi yang harus dipatuhi dan yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah. Pengimplementasian konsep tauhid dalam pengawasan audit kepatuhan syariah menurut bapak Abd. Rasyid Enjang selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:

“Dalam pengawasan kepatuhan syariah, tentu kami menerapkan konsep yang jujur dan amanah, ini dilakukan agar operasional perbankan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.”

1) Jujur (*Shiddiq*)

Shiddiq atau *ash Sidqu* artinya benar atau jujur, lawan dari kata dusta atau bohong (*al kazib*). Seorang muslim dituntut untuk selalu berada dalam keadaan benar lahir maupun bathin, maksudnya adalah benar hati (*shidq al qalb*), benar perkataan

(*shidq al hadits*) serta benar perbuatan (*shidq al 'amal*) (Markas, 2014). Antara hati dan perkataan tidak boleh berbeda apalagi antara perkataan dan perbuatan, semuanya haruslah selaras. Jujur merupakan keselarasan antara perkataan, perbuatan dan perasaan, jujur juga bisa diartikan sebagai kesesuaian antara ungkapan, data serta fakta (Suud dan Subandi, 2017). Kualitas utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor syariah dalam pengawasannya adalah kejujuran. Sifat *shiddiq* ini merupakan sebuah konsep kejujuran dan wajib diterapkan yang tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah akan tetapi juga oleh seluruh umat manusia. Sifat ini sudah dijelaskan urgensinya oleh Allah SWT dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,

Dari penjelasan ayat diatas, maka sangat jelas urgensi dari sifat *shiddiq* itu

sendiri. Ibu Nurul Nabila selaku HRD saat ditanya mengenai *shiddiq* (jujur) ini, beliau memaparkan jawaban:

“Kejujuran sangat penting untuk perusahaan maupun auditor itu sendiri karena dengan adanya sifat jujur ini perusahaan akan semakin berkembang pesat. Sebaliknya, kalau sifat jujur ini tidak diterapkan pada pengawasan sebuah perusahaan tentu akan mengalami penurunan kualitas.”

Auditor syariah harus memiliki sikap *integrity* atau kejujuran serta bersikap adil dan dapat dipercaya dalam pelaksanaan audit maupun hubungan profesionalnya. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan yang tersirat ataupun tersurat,

menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan, menolak bantuan, hadiah, atau keramahan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam kinerjanya, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas, mengkomunikasikan informasi yang baik maupun tidak, menghindari diri dalam keikutsertaan pada kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi. Ketika auditor syariah telah mengedepankan sikap jujur dan adil, maka lembaga keuangan syariah telah menerapkan konsep tauhid dalam audit atau pengawasannya.

2) Amanah (dapat dipercaya)

Amanah adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan dan Al Qur'an pun menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki beban (*mukallaf*). Setiap beban yang diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah karena pembebanan (*taklif*) ini meliputi hak dan kewajiban bagi manusia. Amanah memiliki akar kata yang sama dengan kata iman dan aman sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman juga disebut al mukmin karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah.

Bila manusia tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberi rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Sesuai dengan hal tersebut (wulandari *et al.*, 2011) menyebut dalam penelitiannya tidak dapat dipungkiri bahwa konsep amanah selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban, sesuai dengan amanah yang diemban oleh manajemen berasal dari *stakeholder*, maka sebagai konsekuensinya

manajemen harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan para *stakeholders* kepada prinsipal, baik pada saat tujuan amanah tersebut tercapai maupun tidak.

Tauhid merupakan konsep yang paling penting dan mendasar dalam pengauditan atau pemeriksaan karena menyangkut ubudiah atau ibadah mahdah, muamalah, muasyarah, hingga akhlak. Konsep tauhid bukan sekedar pengakuan realitas, namun juga suatu pertanggungjawaban terhadapnya. Kegiatan pengauditan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, seorang auditor memiliki tanggungjawab akan hal tersebut, seperti tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab pada perusahaan yang diauditnya, terlebih tanggungjawab kepada Allah SWT. Dengan diterapkannya asas ini, auditor tidak akan berbuat sekendak hatinya karena segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Hal ini berlandaskan pada Qur'an surah Al Mudtasthir ayat 38 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 1965
 Kَلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ﴿٣٨﴾

ALAUDDIN

Terjemahan:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar ataupun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakannya sampai hari kiamat kecuali golongan kanan. Artinya mereka dapat

melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal baik yang mereka kerjakan sebagaimana seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya. Golongan kanan yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin yang ikhlas, yang menerima buku amalan mereka disebelah kanan pada hari kiamat. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan golongan kanan dalam ayat ini adalah anak-anak yang memang belum diperhitungkan dosa dan kejahatannya. Bahkan ada yang berpendapat golongan kanan itu adalah malaikat.

a. Tauhid Rububiyah

Makna dari tauhid *rububiyah* adalah mengesakan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah yang bisa lakukan sebagai satu-satunya illah yang berhak diibadahi serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, pencipta semua makhluk dan hanya Allah yang mengatur dan dapat merubahnya. Dialah Allah yang Maha Esa, yang mengatur semua makhluk dengan nikmatnya sebagaimana kita lihat dalam penjabaran diatas bahwa Allah SWT menunjukan keesaanNya dengan memperlihatkan pada kita bahwasanya bukti-bukti atau asal usul audit itu berasal dariNya. Muhammad Rasyid Ridha, mengatakan bahwa ada dua kewajiban seorang hamba terhadap pemeliharaan rububiyah Allah SWT yaitu: pertama, seorang hamba wajib memuji dan bersyukur kepada Allah dengan cara memanfaatkan segala nikmatNya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dirinya dan orang-orang yang harus ia didik yaitu keluarga dan murid-muridnya. Kedua, seorang hamba tidak menyesatkan diri seperti Fir'aun yang menyesatkan dirinya sebagai tuhan. Dengan menerapkan sikap jujur dan adil, auditor syariah telah menjalankan auditnya pada

BPR Syariah Niaga Madani Makassar dengan meyakini sepenuh hati bahwa kejadian atau aktivitas-aktivitas yang dilakukannya adalah dibuat oleh Allah dan akan kembali pada Allah SWT.

Demikianlah Allah menegaskan tentang tauhid *rububiyah*. Tidak ada yang bisa memberi rizki, menyembuhkan segala penyakit, menolak segala macam manfaat, membahagiakan, menyengsarakan, menjadikan seseorang miskin dan kaya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang meluluskan seseorang dari segala macam ujian, yang menaikkan serta menurunkan pangkat dan jabatan seseorang kecuali Allah SWT. Semua ini mewajibkan kita agar hanya meminta kepada Allah semata dan bukan kepada selainNya.

b. Tauhid Uluhiyah

Tauhid *Uluhiyah* adalah mengesakan segala bentuk peribadatan hanya pada Allah SWT, seperti berdo'a, meminta, takut, tawakkal, berharap, bernadzar, menyembelih, cinta, dan lainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Melakukan ibadah kepada selain Allah merupakan perbuatan dzalim yang besar di sisiNya yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Dengan mengesakan Allah dengan tauhid *Uluhiyah*Nya, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Tak heran jika banyak ulama yang mengatakan bahwa tauhid uluhiyah memiliki keutamaan yang lebih dan paling penting dalam bertauhid. Berbeda dengan tauhid *rububiyah* yang memang dimiliki oleh orang beriman maupun kafir sehingga tidak menjadikan pelakunya sebagai

orang yang beriman pada Allah. Salah satu dalil dari tauhid *uluhiyah* ini terdapat dalam Qur'an surah Al Fatihah ayat 5 dan 6:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Terjemahan:

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.

Na'budu diambil dari kata '*ibaadat* yang berarti kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Kemudian *Nasta'in* (minta pertolongan), terambil dari kata *isti'aanah* yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

Dari ayat diatas, Allah dan RasulNya telah dengan jelas mengingatkan mengenai tidak bolehnya seseorang untuk memberikan peribadatan sedikitpun pada selain Allah karena semuanya itu hanyalah milik Allah semata serta manusia pasti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan melibatkan Allah SWT. Dari wawancara yang dilakukan pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar, bapak Abd. Rasyid Enjang Selaku Dewan Pengawas Syariah mengatakan:

“Penerapan audit syariah yang baik adalah dengan mengedepankan nilai, prinsip, serta hukum-hukum syariah yang tentunya sesuai dengan sistem *Sharia Compliance*, maksudnya disini adalah melaksanakan setiap operasional perbankan mulai dari laporan keuangan sampai produk-produk perbankan yang lainnya harus sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah yang merupakan pilar utama dalam pelaksanaan perbankan syariah. Dan prinsip ini

tentunya berlandaskan dengan keimanan kita pada Allah, harus ada rasa takut pada Allah dalam menjalankan amanah (audit).”

Dalam Islam, mengerjakan perintahNya dan menjauhi segala laranganNya adalah sebuah aturan mutlak dalam hidup ini sehingga dalam menjalankan kesehariannya manusia hendaklah selalu berpegang teguh pada prinsip ini. Seperti halnya seorang auditor syariah dalam melakukan pemeriksaannya, harus memiliki rasa takut kepada Allah dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang auditor syariah. Dengan timbulnya rasa takut pada Allah ini, seorang auditor tentunya akan menjalankan proses auditnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT, meminta petunjuk pada Allah serta mendekatkan diri pada Allah. Hal inilah yang menjadikan peran auditor syariah dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar ini berjalan dengan sistem patuh dan tunduk pada aturan Allah.

Berdasarkan uraian diatas, nilai tauhid *uluhiyah* dalam pengawasan audit syariah pada BPR Syariah Madani Makassar adalah hendaknya kita sebagai umat manusia yang memiliki hakikat sebagai khalifah dimuka bumi ini menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala laranganNya. Siapapun yang jujur dengan keimannya pasti akan meninggalkan kesyirikan dalam bentuk apapun, tunduk sepenuhnya adengan hukum dan ketaatan kepada Allah dan pantang melakukan sesuatu yang bertentangan atau menandingi aturan yang telah ditetapkan Allah. Baginya, semua persoalan hidup tidak boleh lepas dari tuntunan Al-Qur'an dan As Sunnah.

c. Tauhid Asma Wa Sifat

Tauhid *Asma Wa Sifat* adalah meyakini secara mutlak akan ke-Esaan Allah yang Maha mulia dengan segala kesempurnaanNya, dan dengan sifat-sifatNya yang agung, mulia lagi indah yang tiada sekutu bagiNya dalam bentuk apapun. Yang demikian itu dengan cara menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk diriNya atau yang telah ditetapkan Rasul akan keagungan dan kemuliaan nama dan sifatNya, memahami secara benar tentang makna dan hukumnya sesuai yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah* tanpa adanya penafian (meniadakan), *ta'thil* (menghilangkan), *tahrif* (merubah) maknanya dan *tamtsil* (menyerupakan) dengan yang lain dan juga menafikan apa yang Allah nafikan untuk diriNya atau yang dinafikan Rasul untukNya, seperti sifat-sifat cela, aib, kekurangan dan hal-hal yang bisa menghilangkan kesempurnaan-Nya.

Jika kita menelaah lebih lanjut mengenai pembahasan diatas, maka kandungan tauhid *Asma Wa Sifat* yang terkandung dalam peran DPS pada BPR Syariah Niaga Madani sangatlah banyak seperti hadits sahih yang diriwayatkan Ahmad dalam Musnad, Ibnu Hibban dalam *Mawaridu Dhom'an*, Al-Hakim Mustadrok, kemudian dishahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam *Sifa'ul 'ali*, Ahmmad Syakir, Al Albani dalam Shahihah dan Al Arnaut dalam *Takhrij Zadul Ma'ad*, yang artinya:

“Aku mohon kepadaMu dengan seluruh AsmaMu yang telah Engkau namakan untuk diri-Mu Engkau uturkan dalam kitabMu atau engkau ajarkan pada salah seorang HambaMu, atau masih dalam rahasia Ghaib padaMu yang Engkau sendiri mengeahuinya.”

Penulis hanya mampu menguraikan sebagian dari itu seperti, Allah merupakan *Ar Raqib* yang berarti Maha Mengawasi, dimana Dia akan selalu

mengawasi serta selalu hadir disetiap helaan nafas kita. Dia mengetahui keadaan kita karena Allah selalu mengurus Makhluaknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Oleh karena itu, dalam setiap kejadian ketika bermuamalah yang kita lakukan hendaklah takut dan berusaha berbuat jujur karena Allah Maha Mengawasi.

Hidup kita di dunia juga nantinya akan diaudit atau diperiksa, dimana dalam proses itu kita semua akan dikumpulkan pada satu tempat yakni padang Mahsyar dikarenakan Allah memiliki sifat *Al Jami'* yang berarti Maha Mengumpulkan atau Menghimpun. Hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa sesungguhnya kelak ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kita semua akan berkumpul dan diperiksa sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama didunia. Allah juga bersifat *Al Mhuhsi* yang artinya Allah Maha Menghitung segala sesuatu dan amal kita selama didunia akan dihitung dengan sebaik-baiknya. *Asy Syahid* membuktikan bahwa Allah menyaksikan segala sesuatu, mendengarkan semua getaran suara, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Melihat yang nampak ataupun yang kasat dan ilmuNya meliputi segala sesuatu yang dengannya Dia menyaksikan dan mengetahui segala sesuatu mengenai hambaNya. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk ciptaannya hendaklah merasa takut ketika hendak melakukan suatu kecurangan, karena Allah mengetahui semua itu dan siksanYa amatlah pedih.

Berdasarkan uraian diatas, nilai-nilai tauhid *Asma Wa Sifat* dalam pengawasan BPR Syariah Niaga Madani yang dapat dipetik adalah segala sesuatu dimuka bumi ini tidak lepas dari keesaan Allah SWT dengan segala Asma dan sifatnya, karena Dialah

Al Jami' yang Maha Mengumpulkan, *Ar Raqib* yang Maha Mengawasi, *Al Muhshi* yang Maha Menghitung, *Asy Syahid* yang Maha Menyaksikan Segala sesuatu, serta masih banyak lagi asma-asma Allah yang lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai peran audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah (BPRS Niaga Madani Makassar) berfokus pada 3 pembahasan utama yaitu peran audit dalam pengawasan *sharia compliance*, kerangka kerja (*framework*) *sharia compliance audit*, serta implementasi konsep tauhid pada *sharia compliance audit* (audit kepatuhan syariah). Peran audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* pada BPRS Niaga Madani Makassar mencakup empat hal yaitu; audit atas laporan keuangan, audit pada produk, audit (pengawasan) atas laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan audit pada produk, layanan, serta audit SDM dalam hal ini pengawasan atau pemeriksaan terhadap karyawan, bertujuan untuk menilai dan memeriksa segala aspek tersebut apakah sudah *compliance* atau *non compliance*. Kemudian dalam kerangka kerja atau *framework* pada BPRS Niaga Madani Makassar berpedoman pada dua hal, yakni fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah. Fatwa DSN-MUI ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk pemeriksaan yang diluar dari aspek laporan keuangan, sedangkan PSAK syariah merupakan panduan yang dikeluarkan oleh IAI sebagai pedoman dalam mengaudit laporan keuangan. Dan pengimplementasian konsep tauhid terhadap audit kepatuhan syariah pada BPRS Niaga Madani Makassar adalah menerapkan sikap jujur serta amanah dalam pelaksanaan auditnya. Sikap jujur

dan amanah yang diterapkan oleh auditor merupakan sebuah pengendalian atau control diri yang bersumber dari tauhid dan keimanannya kepada Allah. Auditor syariah yang memiliki sikap ini berarti menunjukkan rasa patuh dan takutnya pada azab Allah dengan tidak melakukan tindakan *fraud* dalam proses auditnya.

B. Saran

Audit syariah secara umum, belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Audit syariah masih mengacu pada pedoman audit yang berlaku nasional asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Produk pada BPRS Niaga Madani Makassar masih terbatas dan kurang terkait produk yang mereka tawarkan. Terbatasnya produk dan jasa bank syariah ini berdampak pada terbatasnya juga pertumbuhan dan perkembangan inovasi pada bank syariah. Konsep audit syariah mestinya diperluas dengan kegiatan yang berkaitan dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan dan masyarakat. Ada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka pemeriksaan syariah berguna untuk memastikan efektivitas tujuan kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya.

Kompetensi Auditor Syariah selayaknya dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat dari DSN-MUI. Dimana sertifikat tersebut merupakan bukti legalitas bahwasanya auditor syariah tersebut telah diuji dan diakui kompetensinya dibidang syariah mu'amalah. Akan tetapi dalam realitanya, jumlah auditor syariah yang bersertifikat sangat minim dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan dimana keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Peran audit syariah bertujuan untuk memberikan opini atas kesyariahan operasional Lembaga Keuangan Syariah. Namun, penelitian ini berfokus pada tiga pokok masalah yakni peran audit syariah, kerangka kerja (*framework*) audit syariah, konsep tauhid pada pengimplementasian audit syariah.

Keterbatasan dalam penelitian ini juga adalah peneliti hanya melakukan di satu perbankan saja, untuk selanjutnya jika ingin memperluas penelitian ini maka diperluas dengan membandingkan dengan perbankan syariah yang lain sehingga bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan dan prinsip *sharia compliance* yang dilakukan oleh DPS dan audit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOFI, 2007. *Certified Shariah adviser and Auditor (CSAA)*. Retrieved September 10, 2017.
- AICPA, 1994. *Improving business reporting Acustomer focus: Meeting the Information needs of investors and creditors, comprehensive report of the special committee on financial reporting*. New York.
- Adrian Sutedi, 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.
- Afiyanti, Yati. 2008. *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Keperawatan Indonesia. Vol. 12(2): 2008, hlm. 137-141.
- Ahmad Baehaqi dan Suyanto, 2018. *Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif Al-hisbah*. JRKA Volume 4 (2): Agustus 2018, hlm. 15-24.
- Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi, 2019. *Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan)*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 (1): Januari 2019, hlm. 24-35.
- Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, 2014. Jakarta: Depatemen Agama RI.
- Antonio dan Muhammad Syafii, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, S., 2010. *Marketing Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Anugerah, R. (2014). *Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3(1): 2014, hlm. 101-113.
- Arief Hadi Putra, 2017. *Determinasi Tingkat Suku Bunga Perbankan di Indonesia*. Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Keuangan Islam. Vol. 4(1): 2017, hlm. 122-124.
- Arifin, 2009. *"Pengajaran Ilmu Tauhid Di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Cikura Bojong Tegal"*. sinopsis tesis. Tegal: IAIN walisongo, 2009.
- Ansori, 2001. *Pengungkapan Sharia compliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol.3(2): Maret, 2001. dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (diakses 06 November 2013), 2.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, 12 Januari 2011.
- Creswell, 1998. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications.

- Denzim, Norman K. Dan Yvonna S. Lincoln, 1988. *Straegies Of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ekma Eshti Karwati, 2019. *Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor Pada Bank Umum Syariah*, Naskah Publikasi.
- Falikhatun dan Yusmin Umar Assegaf, 2012. Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip-prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *Jurnal Unsulla*, Vol. 1(1): 2012.
- Farida dan Veni Soraya Dewi, 2018. *Kompetensi Auditor dan Shariah Compliance terhadap Praktik Audit Syariah*. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*. Vol. 16(1): April 2018.
- Freeman, R.E., 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Bostom. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, Vol. 2(2): 1984.
- Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*.
- Gray, Kouhy, dan Adams, 1994. *Stakeholder Theory*.
- Hadi dan Samsul, 2017. Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Az Zarqa'* Vol. 9(2): 2017.
- Haamed, W.U., dkk, 2017. *Enterprise Risk Management (ERM) System: Implementation Problem and Role of Audit Effectiveness in Malaysian Firms*. *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 5(11): 2017.
- Hannifa, R., 2010. *Auditing Islamic Financial institutions*. In *Islamic finance: Instruments dan Markets*. Bloomsbury, London: Qfinance.
- Helal Uddin, Hafij Ullah, dan Musharof Hossain, 2013. An Overview on the Basics of Islamic Audit. *European Journal of Business and Management*. Vol. 5(28): 2013.
- Iwan Triyono, 2015. *Awakening The Conscience Inside: The Spirituality Of Code Of Ethics For Professional Accountants*. *Procedia- Social and Behavioral Sciences*, 172: 2015, hlm 254-261.
- Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2016). *Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 4(2): 2016, hlm. 147-167.
- Khan, M. A., 1985. *Role Of the Auditor in an Islamic Economy*. *Journal Of Research in Islamic Economics*, 3(1): 1998, hlm. 31-42.
- Khotibul Umam, 2015. *Urgensi Standarisasi DPS dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*. Vol. 1(2): 2015.

- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, ed., 1996. *Esiklopedi Ilmu-ilmu sosial*. Ter. Haris Munandar, Aris Aanda, Meri J. Binsar, Yanto Mustof, dan Tri Wibowo Budi Santoso. Editor Zubaidi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Madya Dr. Md Golam Mohiuddin dan Md. Shariful Haque, 2012. *Behaving Ethically: An Essence Of Islamic Marketing System*. European Journal of Business and Management, Vol. 4(16): 2012.
- Maradita, A., 2014. *Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank konvensional*. Yuridika, Vol. 29(2): 2014.
- Mardiyah, Q. Dan Mardian, S., 2015. *Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*. Akuntabilitas: Vol. 8(1) April 2015.
- Mardian, S., 2013. *Auditor Syariah : Lulusan Syariah atau Lulusan Akuntansi*. Kordinat Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, Vol. 8(1): 2013, hlm. 179-198.
- Muhammad Syafei Antonio, 2001. *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001).
- Mustaffa, Zaki Ahmad, 2011. *Tawhid Uluhiyyah, Rububiyyah dan Al-Asma' Wa Alsifat Menurut Tafsiran Muhammad Rasyid Rida dalam Tafsir Al-Manar*. Jurnal Ushuluddin, Journal 1.indd 49 2011.
- O. Hasbiansyah, 2008. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*. Mediator, Vol. 9(1): Juni 2008.
- Prabowo, Dani. (2013). "Kredit Fiktif BSM Terendus Sejak 2012, 3 Pegawai Sudah Dipecat", <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/24/2349078/Kredit.Fiktif.BSM.Terendus.sejak.2012.3.Pegawai.Sudah.Dipecat>, Diakses tanggal 2 April 2016.
- Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian, 2015. *Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*. Jurnal Akuntabilitas. Vol. 8(1): April 2015, hlm. 01-17.
- Rahman El Junusi, 1833. *Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah*. Conference Proceedings:Annual International Conference On Islamic Studies XII. 1833.
- Riani dan Mardian, 2017. *Dinamika Kualitas Audit di Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan keuangan Islam. Vol 5(2) oktober 2017, hlm. 177-194.

- Rini, R. (2014). *The effect of audit committee role and sharia supervisory board role on financial reporting quality at Islamic banks in Indonesia*. Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura, Vol. 17(1): 2014 hlm. 145-156.
- Shafii , Zurina, dkk, 2010. *Management of Shariah Non-Compliance Audit Risk in the Islamic Financial Institutions via the Development of Shariah Compliance Audit Framework and Shariah Audit Programme*, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, Vol. (3)2: March: 3–16, 2010.
- Siti Maria Wardayati, 2011. *Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah*. Jurnal Walisongo Vol. 19(1): Mei 2011.
- Slamet, M. 2001. *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syariah (Studi Teoritis pada Konsep Akuntansi Syariah*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Sudjana, Nana. 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sula, A. E., dan Alim, M. N., 2014. *Pengawasan, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah sebagai upaya fraud preventive pada lembaga keuangan syariah*. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting, Vol. 2(2): 2014, hlm. 91-100. Wijaya.
- Suraida, ida, 2005. *Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketetapan Pemberian Opini Akuntan Publik*. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 7(3): November 2005.
- Triuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triuwono, Iwan. 2003. *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah*. IQTISAD Journal of Islamic Economics. Vol. 4(1): 2003, Hlm. 79-90.
- Thoyibatun, S, 2009. *Struktur Pengendalian Intern Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Konvensional*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 14(3): 2009.
- Ummah, Muwahid. 2013. *Analisis Praktik Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Umam dan Khotibul, 2015. *Urgensi Standarisasi DPS Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol 1(2): 2015.

Warsono dkk, 2009. *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: Center of Good Corporate Governance.

Yaacob, 2012. *Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates Perspective*. International Journal of Economics and Finance: Vol. 4(12): 2012.

Zainal Arifin, 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*. (Tangerang: Aztera Publisher, Vol.2: 2009.

<http://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-akad-dalam-transaksi-ekonomi-syariah-detail-3112>



L

A

M

P

I

R

A

N



MANUSKRIP WAWANCARA

Daftar pertanyaan (wawancara) kepada informan terkait Peran Audit Syariah dalam Pengawasan *Sharia Compliance* pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar.

IDENTITAS INFORMAN:

Nama : Nurul Nabila S.E

Jabatan : HRD

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Apakah pada BPR Syariah Niaga Madani Makassar terdapat audit syariah?
2. Menurut ibu, bagaimana peran audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* pada BPRS Niaga Madani Makassar?
3. Menurut ibu, mengapa audit syariah perlu diterapkan pada BPRS Syariah Niaga Madani Makassar?
4. Seberapa penting adanya auditor syariah pada BPRS Niaga Madani Makassar?
5. Menurut anda, siapa yang bertanggungjawab atas terlaksananya audit syariah pada BPRS Syariah Niaga Madani Makassar?
6. Bagaimana Konsep tauhid yang diterapkan pada BPRS Niaga Madani Makassar?

IDENTITAS INFORMAN:

Nama: Abd Rasyid Enjang

Jabatan : DPS (Dewan Pengawas Syariah)

DAFTAR PERTANYAAN:


1. Apa yang bapak ketahui tentang audit syariah ?
2. Menurut bapak, bagaimana penerapan audit syariah yang baik ?
3. Menurut bapak, mengapa audit syariah perlu diterapkan pada BPRS Niaga Madani Makassar?
4. Menurut bapak, seberapa penting adanya pengawasan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) pada BPRS Niaga Madani Makassar ?
5. Bagaimana peran audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* ?
6. Bagaimana Independensi auditor syariah pada BPRS Niaga Madani Makassar ?
7. Menurut anda, apakah dengan adanya audit kepatuhan syariah menjamin segala bentuk operasional BPRS Niaga Madani Makassar berjalan sesuai prinsip syariah?
8. Bagaimana kerangka kerja atau *framework* audit kepatuhan syariah pada BPRS Niaga Madani Makassar ?
9. Menurut bapak, siapa yang bertanggungjawab atas terlaksananya audit syariah ?
10. Terakhir nih pak, konsep tauhid dalam pengawasan audit kepatuhan syariah itu seperti apa ?

DOKUMENTASI





LAMPIRAN BERKAS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax 424836

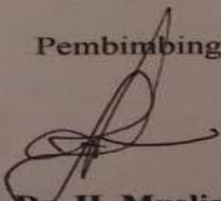
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara SAFARINA PURNAMASARI :
 10800113181, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
 Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang
 bersangkutan dengan Judul, **“Eksplorasi Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan
 Praktik *Sharia Compliance* Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri
 Makassar”**. Memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
 dan dapat disetujui untuk diajukan ke **Ujian Komprehensif**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata-Gowa, 31 ~~08~~ 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag
NIP. 19710402 200003 1 002

Pembimbing II



Suhartono, SE., M.Si., Ak

Hal : PERMOHONAN UJIAN MUNAQASYAH

Samata-Gowa, 24 Februari 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

AssalamuAlaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Safarina Purnamasari
Nim : 10800113181
Semester : XIII (Tiga Belas)
Jurusan : Akuntansi
Judul skripsi : Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Sharia Compliance pada Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Niaga Madani Makassar)

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalam
Menyetujui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Yang Bermohon

Memen Suwandi, S.E., M.Si
Nip. 197202282009121003

Safarina Purnamasari
10800113181

Disposisi:

UJIAN MUNAQASYAH tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. TIM UJIAN MUNAQASYAH

Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pembimbing I	:	Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II	:	Suhartono S.E., M.Si., Akt.
Penguji I	:	Jamaluddin M, S.E., M.Si.
Penguji II	:	Dr. Alim Syariat M.Si.
Pelaksana	:	
Tempat	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/tanggal/jam	:	

Samata-Gowa, 24 Februari 2020

An/Dekan,
Kasubag Akademik

Nurmiah Muin, S.IP., MM
NIP.19660526 199403 2 004

Hal : PERMOHONAN SEMINAR HASIL

Samata-Gowa, 14 Februari 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Safarina Purnamasari
NIM : 10800113181
Semester : XIII TIGA BELAS)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Kota Makassar)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Menyetujui:

Ketua Jurusan Akuntansi

Memen Suwandi, SE., M. Si
Nip. 197202282009121003

Yang bermohon

Safarina Purnamasari
10800113181

Disposisi:

SEMINAR HASIL tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. TIM SEMINAR HASIL

Ketua :
Sekertaris :
Pembimbing I : Prof.Dr.H.Muslimin Kara, M.Ag
Pembimbing II : Suhartono, SE., M. Si. Akt
Penguji I :
Penguji II :
Pelaksana :
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam :

Samata-Gowa, 14 Februari 2020

An/Dekan,
Kasubag Akademik

Nurmiah Muin, S.IP., MM
NIP.19660526 199403 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 164 /EB.I/PP.00.9/1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, 17 Januari 2020

Kepada,
Yth. UPT P2T BKPM
Di,-

Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Safarina Purnamasari**
NIM : 10800113181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

"Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Makassar)"

Dengan Dosen pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
2. Suhartono, SE.,M.Si.Ak

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madani**.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 690 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **Safarina Purnamasari**
NIM : **10800113181**
Tanggal : **25 Februari 2020**
Mahasiswa Jurusan : **AKUNTANSI**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul **"Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Kota Makassar"**
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekertaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Penguji I : Jamaluddin M. SE., M.Si.
Penguji II : Dr. Allm Syahriali, M.Si.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Suhartono, SE.,M.Si. Akt
Pelaksana : Farid Artan, S.Pd. I

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **25 Februari 2020**
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

PEMRAKARS (FAKHRIUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMAH MUJIN, S.I.P., MM)

Hal : PERMOHONAN UJIAN KOMPREHENSIF

Samata-Gowa, 4 November 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Safarina Purnamasari
NIM : 10800113181
Semester : XIII (TIGA BELAS)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Kota Makassar)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Menyetujui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Menren Suwandi, SE., M. Si.
Nip/197202282009121003

Yang bermohon

Safarina Purnamasari
10800113181

Disposisi:

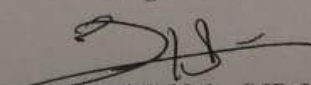
UJIAN KOMPREHENSIF tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. TIM UJIAN KOMPREHENSIF

Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pembimbing I	:	Prof.Dr.H.Muslimin Kara, M.Ag
Pembimbing II	:	Suhartono, SE., M. Si. Akt
Penguji I	:	
Penguji II	:	
Pelaksana	:	
Tempat	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam	:	

Samata-Gowa, 4 November 2019

An/Dekan,
Kasubag Akademik


Nurmiah Muin, S.IP., MM
NIP.19660526 199403 2 004

Hal : PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL

Samata-Gowa, 27 September 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Safarina Purnamasari
NIM : 10800113181
Semester : XII (Dua Belas)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance pada Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Study kasus Bank Syariah Mandiri Kota Makassar)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Menyetujui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin, M.SE.,M. Si
Nip.197206112008011013

Yang bermohon

Safarina Purnamasari
10800113181

Disposisi:

SEMINAR PROPOSAL tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. TIM SEMINAR PROPOSAL

Ketua :
Sekertaris :
Pembimbing I : Prof.Dr.H.Muslimin Kara, M.Ag
Pembimbing II : Suhartono,SE., M. Si,Akt
Penguji I :
Penguji II :
Pelaksana :
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam :

Samata-Gowa, 27 September 2019

An/Dekan,
Kasubag Akademik

Nurmiah Muin, S.IP.,MM
NIP.19660526 199403 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara SAFARINA PURNAMASARI : 10800113181, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan Judul, **“Eksplorasi Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik *Sharia Compliance* Pada Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kota Makassar)”** memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

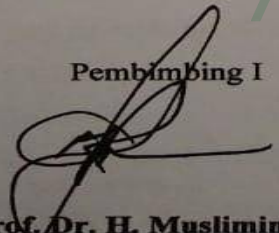
Samata-Gowa,

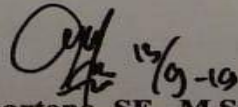
2019

ALAUDDIN
MAKASSAR

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag
 NIP. 19710402 200003 1 002


Suhartono, SE., M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ☎ 424835, Fax424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **SAFARINA PURNAMASARI, NIM 1080113181**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **“Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance pada Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus BPR Syariah Niaga Madani Makassar)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke **Ujian MUNAQASYAH**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, Februari 2020

DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji I

: Jamaluddin M, SE., M.Si.

Penguji II

: Dr. Alim Syariati, M.Si.

Pembimbing I

: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Pembimbing II

: Suhartono, SE., M.Si., Akt.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa. ■ 424835, Fax 424836


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara SAFARINA PURNAMASARI :
10800113181, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang
bersangkutan dengan Judul, **"Eksplorasi Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan
Praktik *Sharia Compliance* Pada Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Niaga Madani Makassar**. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Hasil


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 2020

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag
NIP. 19710402 200003 1 002

Pembimbing II


Suhartono, SE., M.Si., Ak



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax: 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa ■ 424835, Fax: 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus BPRS Niaga Madani Makassar) yang disusun oleh **Safarina Purnamasari**, NIM: 10800113181, Mahasiswi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis 27 Februari 2020 M, bertepatan dengan 3 Rajab 1441 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, 14 September 2020 M

26 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak	(.....)
Munaqisy I	: Jamaluddin M, SE., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Alim Syariati, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Suhartono, SE., M.Si., Akt	(.....)

Diketahui Oleh :

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
NIM 19661130 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa. ☎ 424835, Fax 424836

PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Nomor : /EB/2019

Proposal penelitian saudara **Safarina Purnamasari**, NIM: **10800113181**, Mahasiswa Jurusan **Akuntansi** pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi draft proposal penelitian dengan judul **“Eksplorasi Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Makassar”**. Memandang bahwa proposal penelitian telah diseminarkan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan memenuhi persyaratan ilmiah untuk mengikuti **ujian komprehensif** dan melaksanakan penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, Oktober 2019

Penyusun,

Safarina Purnamasari
 NIM. 108001131811

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag.
 NIP. 19710402 200003 1 002

Pembimbing II

Suhartono, ST., M.Si., Ak.

Penguji I

Jamaluddin M, SE., M.Si.
 NIP. 19720611 200801 1 013

Penguji II

Dr. Alim Syariaty, SE., M.Si.
 NIP. 19850926 201503 1 004

Diketahui oleh :
Ketua Jurusan Akuntansi

Memen Suwandi, SE., M.Si.
 NIP. 19720228 200912 1 003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2485 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Safarina Purnamasari : NIM: 10800113181**
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|---|---|
| <p>Ketua
Sekretaris
Penguji Dirasah Islamiyah
Penguji Akuntansi Keuangan
Penguji Auditing
Pelaksana</p> | <p>: Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.
: Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.
: Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag.
: Dr. Saiful, SE., M.S.A., Ak.
: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
: Muhammad Irfan Mas'ud</p> |
|---|---|
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 07 November 2019
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Absani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

- Tembusan :
1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
 2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
 3. Arsip

PEMRAKARS (FAKRUUNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIAH MUIN, S.IP. MM)


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

NAMA MAHASISWA

Safarina Purnamasari

NIM

10800113181

SEMESTER/TAHUN AKADEMIK

DUA BELAS (XII)

NO	JUDUL YANG DIUSULKAN	DESKRIPSI SINGKAT TENTANG PERMASALAHAN (ABSTRAK) YANG AKAN DITELITI	JUNJLAH DAFTAR		JENIS PENELITIAN	MANFAAT PENELITIAN	JUDUL YANG DITERIMA	NAMA PEMBIMBING
			KEPUSTAKAAN	+				
1	EKSPLORASI PERAN AUDIT SYARIAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK SHARIA COMPLANCE PADA KINERJA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Study kasus Bank Syariah Mandiri Kaga, Makassar)	Ruang Lingkup Audit Syariah dan Peran Auditor Syariah tentu berbeda dengan audit konvensional. Audit syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena auditor diharapkan dapat berurusan dengan peraturan dan pedoman yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan tugas auditor syariah yang juga harus melakukan uji kepatuhan syariah. Mereka juga harus memastikan bahwa manajemen telah mengikuti prinsip bebas riba dan halal yang telah ditentukan oleh DPS (Haniffa, 2010). Fokus Auditor syariah bukan hanya pada aspek keuangan, lebih daripada itu, auditor syariah harus bisa memastikan produk, jasa dan semua kegiatan yang dilakukan oleh LKS telah sesuai dengan prinsip	15 DAFTAR KEPUSTAKAAN	+	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara terstruktur dan dari pihak ketiga atau literatur, dokumentasi.	Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah terutama yang berkaitan dengan audit syariah dalam menjaga kesesuaian sharia compliance pada bank umum syariah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah stakeholder theory dan syariah interprise theory (SET)	1. Prof. Mulyawati M. A.	
							2. Subianto P. A.	



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 401 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Safarina Purnamasari, NIM : 10800113181
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Safarina Purnamasari, NIM: 10800113181** untuk melaksanakan seminar hasil
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Suhartono, SE, M.Si. Akt
Penguji I : Jamaluddin M, SE., M.Si.
Penguji II : Dr. Alim Syahriati, M.Si.
Pelaksana : Farid Arfan, S.Pd. I

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 17 Februari 2020
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Tersusun : 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Asip

PEMRAKARS (Fakhrunnisa, SE)	KASUBAG AKADEMIK (Nurmiah Muin, S.IP., M.M)



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 1761 Tahun 2019

T E N T A N G
**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Safarina Purnamasari Nim: 10800113181** tertanggal 26 Agustus 2019 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: **"Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance pada Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Study kasus Bank Syariah Mandiri Kota Makassar)**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Prof.Dr.H.Muslimin Kara, M.Ag
2. Suhartono,SE., M. Si.Akt
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 11 September 2019



PROF. DR. H. ABUSTANI ILYAS, M.Ag
NIP. 19661130 199303 1 003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2125 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Safarina Purnamasari, NIM : 10800113181
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Safarina Purnamasari**, NIM: **10800113181** tertanggal 03 Oktober 2019 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul: "**Eksplorasi Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik Sharia Compliance pada Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kota Makassar)**".
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Suhartono, SE., M.Si. Akt
Penguji I : Jamaluddin M, SE., M.Si.
Penguji II : Dr. Alim Syahriali, M.Si.
Pelaksana : Lenny Martini
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya


Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 09 Oktober 2019
Kuas Dekan
Nomor: 7812/EB.1/Kp.07/10/2019
Tanggal: 09 Oktober 2019

Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si.
NIP. 19730525 200801 1 017

PEMRAKARSA (FAKHRUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIAH MUIN, S.IP.,MM)




1 2 0 2 0 1 9 1 4 2 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 425/S.01/PTSP/2020

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Madani Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 164/EB.I/PP.00.9/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a

Nomor Pokok

Program Studi

Pekerjaan/Lembaga

Alamat

: SAFARINA PURNAMASARI

: 23 Januari s/d 23 Februari 2020

: Akuntansi

: Mahasiswa(S1)

: Jl. Slt Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EKSPLOKASI PERAN AUDIT SYARIAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK SHARIA COMPLIANCE PALEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAKASSAR)

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Januari s/d 23 Februari 2020


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 22 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu




A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.


SIMAP PTSP 23-01-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936

Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Safarina Purnamasari dilahirkan di Bima pada tanggal 6 Februari 1995. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, buah hati dari ibunda Asma dan ayahanda Zakaria A. Rahim. Penulis memulai pendidikan di TK Darma Wanita kec. Wawo pada tahun 2000-2001, Setelah itu melanjutkan pendidikan di SDN 1 Maria pada tahun 2001-2007. Setelah lulus SD, Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Wawo pada tahun 2007-2010. Pada tahun tersebut juga, penulis melanjutkan pendidikan di SMA 2 Wawo dan tahun ajaran berikutnya, penulis memutuskan untuk pindah di SMA 3 Kota Bima hingga tahun 2013. Kemudian setelah tamat dari pendidikan SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan mengambil jurusan Akuntansi pada tahun 2013 sampai 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R